

Untuk Perempuan di Tanah Kami



KUMPULAN REPORTASE JURNALISME
LINGKUNGAN BERPERSPEKTIF GENDER

Untuk Perempuan di Tanah Kami

Kumpulan Reportase Jurnalisme
Lingkungan Berperspektif Gender

Penulis

Yuli Z

Siti Umrotus Sholichah

Hilda Putri Ghaisani

Maria Baru

Emi La Palau

Masya Pratiwi

Agus Susanto

Arrneto Bayliss



Untuk Perempuan di Tanah Kami

Kumpulan Reportase Jurnalisme
Lingkungan Berperspektif Gender

Penulis

Yuli Z
Siti Umrotus Sholichah
Hilda Putri Ghaisani
Maria Baru
Emi La Palau
Masya Pratiwi
Agus Susanto
Arneto Bayliss

Penyusun

Nabila Wahyu

Mentor

Nur Aini
Anita Dhewy
Luviana Ariyanti

Fasilitator

Nani Afrida

Desain cover dan penata letak

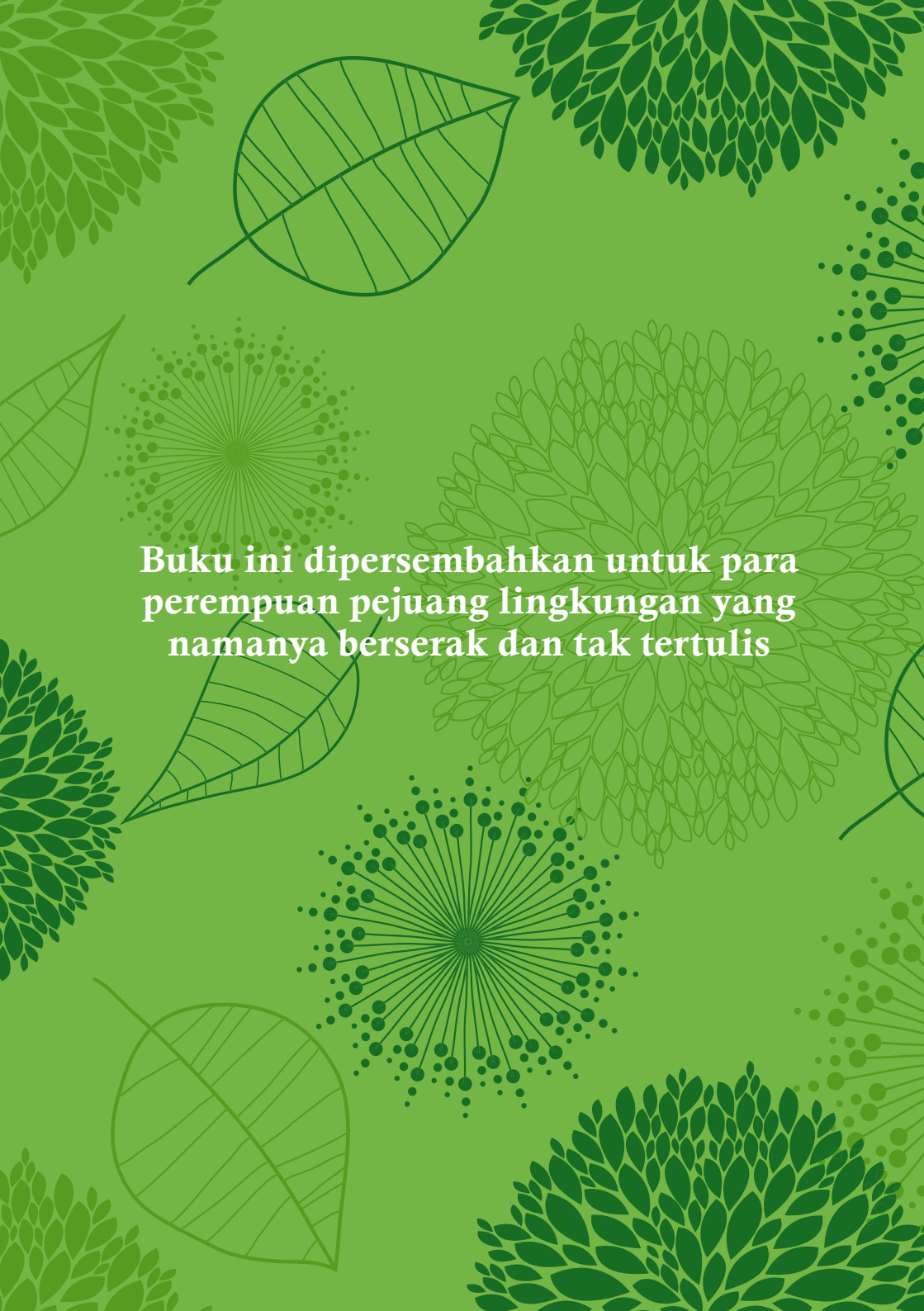
Ardiles

Diterbitkan pertama kali oleh
Konde.co dan Earth Journalism Network (EJN)

Cetakan pertama, November 2023

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak tulisan dalam buku ini sebagian atau seluruhnya
dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



Buku ini dipersembahkan untuk para perempuan pejuang lingkungan yang namanya berserak dan tak tertulis

DAFTAR ISI

- 5 Prolog- Penyusun
- 6 Kata Pengantar – Florence Armein (EJN)
- 7 Kata Pengantar – Luviana (Konde.co)
- 8 Tambang Nikel Harita di Pulau Wawonii ‘Membunuh Kami Secara Halus’ (**Yuli Z**)
- 27 Survey: Mayoritas Mahasiswi di Yogyakarta Tak Mau Jadi Petani Karena Alih Fungsi Lahan dan Buruknya Pemerintah Kelola Pertanian (**Siti Umrotus Sholichah**)
- 36 Tak Cuma Perempuan, Laki-laki juga Mengolah Sampah: Komunitas Pampers Mania dan Bank Sampah Rosella (**Hilda Putri Ghaisani**)
- 44 Ancaman Berlapis Krisis Sampah Bandung bagi Perempuan (**Emi La Palau**)
- 52 Perempuan Malagufuk Terpinggir di Tengah Pengembangan Ekowisata (**Maria Baru**)
- 61 Cerita Pengalaman Para Perempuan Muda Aceh Mengubah Kebiasaan Warga Lewat Aplikasi e-tikbroh.yak (**Masya Pratiwi**)
- 69 Gajah Liar Masuk Kampung, Konflik Satwa Terjadi, Suami dan Istri Jadi Korbannya (**Agus Susanto**)
- 76 Terpaksa Bertahan: Warga Muara Angke Di Tengah Sulitnya Akses Air Bersih dan Kondisi Ibu Hamil Yang Rentan (**Arneto Bayliss**)
- 84 Identitas Penulis

PROLOG

Mengumpulkan jurnalis untuk melakukan peliputan tentang persoalan lingkungan dari perspektif gender, merupakan hal luar biasa yang dilakukan Konde.co yang didukung Earth Journalism Network (EJN).

Program ini diawali dengan mengeluarkan modul pelatihan. Modul ini memperkenalkan tentang isu ekofeminisme atau cara mengarusutamakan gender ke dalam berita lingkungan. Para jurnalis mendapatkan pengetahuan soal ekofeminisme yang membantu kita memahami kerusakan lingkungan dari perspektif perempuan dan gender.

Setelah itu, dilakukan training lingkungan berspektif perempuan selama 2 kali untuk pers umum dan pers mahasiswa. Dari 2 kali penyelenggaraan training tersebut, kemudian terpilih 8 orang jurnalis yang hasil peliputannya disajikan dalam buku ini.

Buku ini menyajikan peliputan dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Aceh, Kalimantan, Lampung, Sulawesi Tenggara, hingga Papua. Peliputan ini sangat beragam, dari persoalan perusakan lingkungan dan perebutan lahan, hingga isu-isu urban seperti mengapa perempuan muda tak tertarik lagi menjadi petani, atau isu urban lain seperti menyelamatkan lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah pembalut dan pampers. Semua disajikan dengan gaya peliputan mendalam dan sejumlah *personal story* yang menjadi daya tarik tulisan.

Setelah diluncurkan dengan mengundang pembicara dari pers mahasiswa dan jurnalis untuk berbagi tantangan dalam inklusi gender dalam berita lingkungan dan bagaimana mereka mengatasi tantangan peliputan lingkungan berperspektif perempuan, buku juga dibagikan kepada publik untuk menjadi bagian dari literasi pengetahuan lingkungan berperspektif perempuan atau gender. Selamat membaca!

Penyusun
Nabila Wahyu

KATA PENGANTAR

Environmental journalism is a critical field that sheds light on the intricate relationship between human beings and the natural world. This relationship is becoming more complicated as the world grapples with the climate crisis. Internews' Earth Journalism Network considers climate change to be the story of the century.

Climate change and environmental degradation impacts vary across regions, generations, income groups, and genders. Based on the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change, marginalized groups will experience the greatest harm. The poor -- primarily in developing countries -- will be disproportionately affected.

Women are increasingly more vulnerable than men to climate crisis impacts because they represent the majority of the world's poor and are more dependent on threatened natural resources. According to the UN, 70 percent of the 1.3 billion people living in poverty are women. In urban areas, 40 percent of the poorest households are headed by women.

Journalists and media play critical roles in informing their audiences about how the climate crisis affects mankind globally and how it impacts different groups in society and local communities. However many environmental stories still neglect the gender aspect.

Studies reveal how women often bear the brunt of environmental degradation due to their roles in society and their lack of access to resources and decision-making power. But women are also at the forefront of many environmental movements and are key actors in sustainable practices. In Indonesia, one media organization has been courageous in giving voice to women and minority groups.

Konde has been steadfast in reporting on women's and minority issues and providing strong gender perspectives. Both Konde and EJM believe increasing the knowledge and capacity of journalists and student press to report on environment and climate crisis topics more effectively, is critical.

It has been an honor to be part of this empowering program where professional journalists and student reporters immerse themselves in discussions on gender, environment, and community impacts, and where they hear first-hand from women environmental defenders about their struggles.

We hope this book will provide a window into the ecological and climate issues women face in different parts of Indonesia, and how they are leading movements to protect their environments.

Selamat membaca!

Florence Armein
(Senior Indonesia Coordinator, Internews' Earth Journalism Network)

KATA PENGANTAR

Gerakan Ekofeminisme mengajarkan bagaimana kita tak boleh hanya mengambil atau mengeksploitasi lingkungan, namun juga harus menanam dan memelihara lingkungan. Karena mengambil tanpa menanam, sama artinya dengan menuai tapi tak mau memelihara.

Isu lingkungan dan gender menjadi fokus dalam gerakan feminisme, khususnya ekofeminisme atau ekologi feminisme. Aliran pemikiran ini menjadi makin relevan mengingat hari-hari ini kita menghadapi perubahan iklim dan krisis iklim global. Argumen dasar yang melandasi aliran pemikiran ini adalah penindasan khusus terhadap perempuan dan alam, berasal dari mengasosiasikan perempuan dengan alam dan lingkungannya. Perempuan dan alam sering digambarkan sebagai sesuatu yang irasional dan kacau, sedangkan perspektif patriarki sering dicirikan sebagai rasional dan terkendali.

Para jurnalis atau media adalah seseorang atau institusi yang penting untuk mengkampanyekan isu lingkungan dari perspektif perempuan atau perspektif gender. Media mempunyai peran penting dan signifikan dalam mengajak publik untuk menyelamatkan lingkungan dan mendorong perubahan kebijakan lingkungan dari perspektif gender. Media bisa menuliskan suara-suara korban dan menjadi rujukan bagi korban lingkungan untuk bersuara. Program yang diselenggarakan *Konde.co* dengan didukung *Earth Journalism Network (EJN)* merupakan bagian untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana melakukan peliputan lingkungan berperspektif gender.

Tulisan tentang suara korban kerusakan lingkungan dari perspektif perempuan/gender ini menjadi magnitude penting agar para perempuan korban yang dulu tidak berani bersuara, jadi berani bersuara. Lebih jauh, peliputan lingkungan berperspektif perempuan akan membantu kita memahami kerusakan lingkungan, ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial secara lebih luas sebagai persoalan yang terkait dengan dominasi maskulin dalam masyarakat.

Hal ini dengan sendirinya juga akan memberikan perhatian pada pentingnya menyelamatkan lingkungan dari perspektif perempuan. Karena menyelamatkan lingkungan, sama saja dengan menyelamatkan masa depan bumi, perempuan dan anak-anak, subjek yang paling terdampak dari penghancuran lingkungan dan ruang hidup yang tengah berlangsung saat ini.

Luviana Ariyanti
(Pemimpin Redaksi *Konde.co*)

Tambang Nikel Harita di Pulau Wawonii 'Membunuh Kami Secara Halus'

*Perlawanan dan kesaksian petani-petani Wawonii mengadang korporasi tambang nikel
di Sulawesi Tenggara.*

Yuli Z



Air yang mengalir di rumah Saharia, warga Desa Dompodomo Jaya pada tanggal 20 Mei 2023.
(Project M/Riza Salman)

“Hewan pun membutuhkan air. Kalau tidak ada air, mati konyol kita,” Ratna merutuk.

Ratna kesal. Pipa yang saban hari mengalirkan air bersih ke rumahnya kini membawa sedimentasi lumpur. Ratna meyakini lumpur itu mengandung tanah bekas galian nikel PT Gema Kreasi Perdana, anak perusahaan Harita Group, pemilik tunggal izin konsesi di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan. Sebab, air yang digunakan selama ini tak pernah sekeruh itu walau di musim hujan.

Ratna menangis. Hatinya teriris. Ia marah bercampur kecewa. Marah kepada perusahaan yang dianggapnya semena-mena. Kecewa kepada siapa saja yang mendukung beroperasinya perusahaan tambang di pulau yang luasnya hanya 706 km² itu.

Hari-hari berikutnya, Ratna harus menunggu berjam-jam hingga air cukup jernih agar bisa digunakan mandi dan mencuci pakaian dan perabotan dapur. Untuk keperluan memasak, Ratna terpaksa membeli air yang harganya Rp8.000 per galon. Kondisi air belum pulih saat Wawonii Tenggara kembali diguyur hujan pada 21 Mei 2023, menyebabkan sumber mata air kian keruh.

Beberapa jam setelahnya, pipa yang mengalirkan air dari satu-satunya bak penampungan yang digunakan warga selama ini terputus. Warga menduga ada “oknum” yang sengaja memutus pipa agar masalah air tercemar tidak tersebar luas.

Ratna sudah menduga hal ini jauh sebelumnya. Tak heran ia mati-matian menolak masuknya tambang.

“Kata mereka yang jual lahan, aktivitas tambang tidak ada dampaknya. Sekarang sama-sama kita cari air bersih. Mereka dikasih bodo-bodo perusahaan.”

“Hancur kami di sini,” suaranya meninggi.

Ibu dua anak ini sudah 58 tahun menetap di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara. Sejak lahir, berumah tangga, dan sekarang memiliki cucu. Walau hidupnya tak berjalan mulus-mulus saja, ia masih mampu memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan sampai hari ini. Apalagi sekadar mendapatkan air bersih.

“Kami perjuangkan pulau ini karena di sini kami lahir. Di sini tumpah darah kami.”

Pulau Wawonii telah menyediakan segala yang dibutuhkan. Tanaman jambu mete, pala, cengkih, dan kelapa, cukup untuk menopang hidupnya. Ratna tak pernah tergiur lahannya ditawarkan uang ratusan juta rupiah. Uang dari perusahaan bisa habis dalam sekejap, katanya, tapi hasil perkebunan bisa dinikmati terus-menerus.

“Setahun hasil pala bisa berton-ton. Kita dibilang tolak rezeki. Lantas, ini bukan rezeki?”

Lagi pula, tanpa hadirnya tambang, Ratna merasakan hidupnya telah

berkecukupan. Hasil perkebunan memungkinkannya menabung dan membeli berbagai keperluan hidup. Hasil kebun itu juga telah membawanya umrah pada awal tahun 2023.

“Biar tidak ada uang, kita masih bisa makan. Kita punya pemikiran jangan cuma sejengkal. Harus berpikir jauh ke depan. Kita punya anak cucu.”

Ratna beranjak ke halaman rumah. Di sana, biji dan bunga pala dijemur di bawah terik matahari. Ditatapnya biji-biji pala yang tak lama lagi menjadi rupiah.

Ratna berkata telah bosan menyampaikan keresahan hatinya. Suaranya hanya dianggap angin lalu oleh para pengambil kebijakan. Padahal, tambahnya, “perempuan yang dirugikan karena kami memasak dan mengurus dapur.”

Di tengah berbagai penolakan dan gejolak yang terjadi, eksavator perusahaan terus menggunduli lahan dan mengeruk tanahnya. Kendaraan-kendaraan pengangkut ore nikel tetap lalu lalang menuju pelabuhan, yang letaknya hanya 200-an meter dari rumahnya.



Ratna bertekad tak akan menyalurkan hak pilihnya pada pemilu di tingkat lokal nanti. Ia kadang kecewa. Merasa ditinggalkan anggota dewan yang seharusnya menjadi penyambung suaranya. Merasa tak dipedulikan kepala daerahnya.

“Saya akan golput. Hanya suara kami yang dibutuhkan. Kita demo di DPR, diusir seperti binatang. Dibentak-bentak. Kita demo di Kendari, dihantam dengan gas air mata. Saya hampir mati karena sesak napas.”

“Katanya, mendatangkan investor untuk kesejahteraan, tapi malah menyengsarakan. Mematikan secara halus.”

“Sekarang tidak ada keadilan. Tidak ada perikemanusiaan. Kayak penjajahan Belanda kita dibikin. Penjajahnya negara sendiri.”

Bersembunyi di Hutan

Pukul 6 pagi pada pertengahan Mei 2023 di Desa Sukarela Jaya, Hastati sibuk membelah buah kelapa tua untuk dijadikan kopra. Totalnya 1.000 buah. Sebagian kelapa itu milik sendiri yang baru saja dipanen, sebagian lain dibeli dari warga sekitar. Saat itu harga kopra putih Rp7.500/kg dan kopra hitam Rp6.500/kg. Dalam satu kali panen, setiap tiga bulan, kelapa yang dihasilkan biasanya mencapai 3.000 buah. Selain daging kelapa, Hastati mendapatkan keuntungan ekonomi dari tempurung kelapa yang dibakar menjadi arang.

Hastati, 45 tahun, adalah ibu enam anak. Seperti warga lain yang menolak tambang, Hastati merasa sudah cukup atas hasil perkebunannya. Ia berkata pernah ditawari uang Rp1 miliar agar mau melepas tanah seluas 2 ha warisan orang tua. Ia juga bercerita ditawari umrah gratis berkali-kali, bantuan biaya pendidikan untuk anak-anaknya, dan pernah diajak bekerja di tambang.

“Tapi saya tolak. Kita mau mempertahankan lahan dan Pulau Wawonii. Lebih baik kita berdikari begini.”

Uang dari perusahaan, katanya, bisa habis dalam sekejap. Namun, lahan yang dimilikinya, selama tidak dirusak, bisa memberikan kehidupan hingga generasi mendatang.

“Kalau sudah habis gunung, perusahaan pulang. Sedangkan kita?”

Di lahannya tumbuh pala, cengkih, dan jambu mete. Baru setahun terakhir Hastati mulai membuat kopra. Pohon pala dan cengkih baru belajar berbuah. Tahun lalu, ia memanen 50 kg cengkih. Sementara pala sekali panen rata-rata 5 kg. Jambu mete menjadi tanaman andalannya. Setahun bisa menghasilkan 3-4 ton.

Hastati tinggal bersama suami dan empat anak dan seorang cucu. Sulitnya mendapatkan air bersih menghantam seluruh kehidupannya, tak cuma mempengaruhi ekonomi rumah tangga. Hastati tak pernah menyangka akan melalui fase ini. Sejak dulu, ia tak pernah kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur di Roko-Roko rata-rata sudah ditutup lebih dari satu dekade sejak air dari mata air Banda mengalir lancar ke kampung.

“Dulu kita senang air mengalir ke rumah. Sekarang harus ke sungai untuk mencuci. Bagaimana kita tidak mau marah?”

Sebagai bentuk penolakan tambang, Hastati menolak menerima bantuan air dari perusahaan. Ini bukan hanya tentang air. Ini tentang prinsip, katanya. “Sekarang terpaksa pakai air kali untuk memasak.”

Hastati tak pernah lupa kejadian tahun 2022. Saat itu ia bersama ibu-ibu lain nekat melepas baju dalam aksi menolak tambang nikel. Ia juga pernah bersembunyi di hutan selama nyaris dua bulan. Ia takut ditangkap lantaran dianggap menghalangi pertambangan.

“Saya jengkel kepada perusahaan. Kita mempertahankan lahan malah dicari-cari polisi. Padahal kita tidak membunuh atau mencuri.”

Hastati bersembunyi di hutan bersama delapan warga lain. Di antara mereka ada



Amlia yang menolak menjual lahannya untuk dijadikan jalan hauling atau jalan akses kegiatan pertambangan.

Saya menemui Amlia di kebunnya pada 20 Mei 2023. Ia berkisah bersembunyi di hutan lantaran takut ditahan polisi setelah menerima surat panggilan sebagai “saksi” oleh Kepolisian Resor Konawe Kepulauan.

“Kalau tidak dikasih lahannya, kita tidak dilepas di kantor polisi. Yang dipanggil ke polisi yang punya lahan. Kita bingung kenapa dipanggil. Lebih baik kita lari. Tidak usah kita hadir panggilan polisi itu.”

Selama persembunyian itu, mereka melewati hari-hari cukup berat. Siang berpencar di hutan, malam mencari gubuk untuk berlindung. Dalam sehari, kadang

tidak makan apa pun. Pernah mereka terpaksa makan singkong rebus basi.

“Biarpun makan, kita tidak rasa makan. Begitu juga kita duduk. Tidak tenang. Mau tenang bagaimana? Kita lari hampir dua bulan. Kita dicari-cari petugas polisi,” tutur Amlia.

Amlia juga pernah diiming-imingi gaji untuk anak pertama dan suaminya tanpa perlu bekerja oleh pihak perusahaan.

“Saya ditawari terserah mau berapa. Kalau mau, anak dikasih kuliah sambil kerja di kantor. Bapak dapat gaji biar tidak kerja. Anak yang paling tua juga dapat gaji biar tidak kerja.”

Tak jauh dari gubuknya, tumbuh pohon singkong berusia dua bulan dan tanaman lain seperti cabai, pisang, dan kelapa. Hujan deras beberapa hari sebelumnya menyebabkan sebagian lahan itu terendam air yang membawa sedimentasi lumpur merah setinggi pinggang orang dewasa. Amlia menduga tanah merah itu mengandung bekas galian nikel.

Kini Amlia dan suaminya harus berjalan kaki sejauh 2 km dari tempat memarkir sepeda motor mereka setiap kali ke kebun. Rute yang biasa dilalui telah menjadi jalan hauling PT Gema Kreasi Perdana. Saat masih bisa menggunakan sepeda



motor, mereka biasanya ke kebun pukul 8 pagi. Sekarang paling telat berangkat pukul 6.30. Dari semula hanya setengah jam naik motor, sekarang mereka harus berjalan kaki selama dua jam untuk tiba di kebun.

Hasil panen pun dipikul dengan berjalan kaki melewati jalanan berbukit. Saat musim panen jambu, Amlia dan suaminya terpaksa mengangkut jambu seberat 20-30 kg dengan berjalan kaki.

“Walau sulit, kita berusaha tembus. Namanya petani. Pendapatan kita dari berkebun,” kata Amlia, yang membopong singkong seberat 20 kg dari kebun menuju parkir motor sejauh 2 km dengan berjalan kaki.

Merusak Mata Air

Saharia, warga Desa Dampo-Dampo Jaya, seperti biasa bangun pagi hari untuk menyiapkan sarapan. Saat memutar keran untuk mencuci ikan, air yang keluar berwarna oranye. Ia terpaksa memasak dan mencuci bahan makanan menggunakan air hujan yang ditampung dari atap rumah beberapa hari sebelumnya.

Saharia, 50 tahun, adalah ibu tunggal empat anak. Keluarga ini memiliki kebun seluas 250 m² yang ditanami kelapa, jambu mete, pala, dan cengkih. Saharia mengolah kelapa yang buahnya dijadikan kopra dan tempurungnya dijadikan arang, dibantu ketiga anaknya. Salah satu anaknya saat ini mencari nafkah di perantauan.

Saat ini Saharia cemas kebun mereka bisa diserobot sewaktu-waktu oleh perusahaan.



PT Gema Kreasi Perdana, anak usaha Harita Group, melakukan produksi dan pengapalan ore nikel pada Agustus 2022. Lokasi penggalian korporasi berada di beberapa desa di Kecamatan Wawonii Tenggara, yang diduga telah mencemari sumber mata air. Pamsimas (program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) Sukarela Jaya dan Pamsimas Dompodompoda Jaya, keduanya menyuplai air bersih untuk dua desa tersebut, mengalirkan air berlumpur sejak hujan deras pada 9 Mei 2023.

Pada 19 Mei 2023, saya mendatangi mata air Banda di hutan Wawonii Tenggara, sekitar satu jam berjalan kaki dari Desa Dompodompoda Jaya. Mata air di dalam gua karst dengan ketinggian 119 mdpl ini mengalir ke beberapa anak sungai sebagai sumber pengairan kebun dan pertanian warga.

Pada 21 Mei, Wawonii Tenggara kembali diguyur hujan. Kawasan perairan di Desa Sukarela Jaya, Dompodompoda Jaya, dan Roko-Roko berubah warna cukup pekat. Di tengah hujan, warga yang tinggal di tepian laut membersihkan selokan, mengalau material lumpur yang terbawa air hujan. Menurut warga setempat, perubahan warna air laut kerap terjadi saat hujan, tapi tidak separah itu.

Saya memeriksa pipa di rumah warga. Airnya cokelat pekat. Tak sampai dua jam setelah hujan berhenti, aliran air di rumah-rumah warga terhenti. Dalam perjalanan, saya bertemu seorang wanita yang membawa bundel cucian di atas sepeda motor. Ia berteriak, "Saya mau pergi bilas cucian." Perempuan lain menimpali, "Air ini sudah tidak ada gunanya."



Saya mendatangi lokasi pertemuan sungai Roko-Roko dan Tambusiu-siu yang mengalirkan mata air Banda. Gradasi warna mencolok antara keduanya. Sungai Roko-Roko hanya sedikit keruh, sedangkan Tambusiu-siu berwarna kecokelatan. Sungai Roko-Roko adalah satu-satunya yang tidak tercemar dan masih digunakan warga Desa Roko-Roko, Sukarela Jaya, dan desa sekitar untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Perusahaan membagikan air bersih tapi sebagian warga menolak sebagai sikap penolakan atas aktivitas tambang di Wawonii.

Saharia termasuk warga yang menolak tambang. Sebagai ibu tunggal, ia mengemban peran ganda mengurus rumah dan mencari nafkah. Ia harus ke sungai berjarak 500 meter untuk mendapatkan air bersih, selain mengandalkan air hujan. Ia dan keluarganya terpaksa mengurangi frekuensi mandi karena merasa tak nyaman menggunakan air kotor. Belum lagi anggota keluarga perempuan yang setiap bulan harus melalui fase menstruasi. Di rumahnya, ada tiga perempuan.

“Kita pusing tidak ada air begini,” keluhnya. “Pada masa-masa datang bulan itu berat sekali. Karena harus sering bersih-bersih. Sekarang mau apa? Kita tahan-tahan mi.”

Sampai pertengahan Agustus 2023, air bersih belum juga pulih. Padahal sudah memasuki musim kemarau. Walau tak begitu keruh, air masih berlumpur. Selain itu, saluran air kerap kali macet. Sejak terputus pada Mei, air kembali mengalir pada awal Agustus.

Perasaan takut menghantui Saharia setiap kali menggunakan air yang diduga kuat tercemar itu. Tapi tak ada pilihan lain. Untuk kebutuhan minum, ia kadang mengambil air di sumur warga lain yang berjarak 100 meter dari rumahnya, dengan menggunakan gerobak pasir untuk mengangkut air.

“Saya khawatir soal kesehatan. Biasanya habis mandi kita gatal-gatal. Tapi mau bagaimana lagi? Kita butuh mandi. Saya rindu kehidupan yang dulu,” katanya.

Diserang Gatal-Gatal

Sudah lama tidur Ristan tak nyenyak. Nyaris setiap malam ibu muda berumur 24 ini terbangun dan menyaksikan bayi kesayangannya kesulitan tidur. Abyan, anak lelakinya, diserang gatal-gatal sejak berusia lima bulan. Mulanya pada area betis dan pergelangan kaki muncul bintik-bintik kecil, lambat laun menyebar hingga ke jari dan telapak kaki. Sekarang usia Abyan sembilan bulan.

“Ini sudah lumayan membaik. Awalnya parah sekali. Penuh luka. Jorok,” ujar Ristan memperlihatkan kaki Abyan seperti parutan.

Penyakit itu juga menyerang Ristan, suaminya, dan kedua orang tuanya. Tubuh Nahati, ibu Ristan, berbintik hitam dan terasa gatal sekitar enam bulan lalu. Penyakit ini dialami hampir semua warga di tiga desa meliputi Mosolo, Sinar Mosolo, dan Sinaulu Jaya.

“Awalnya gatal di semua badan. Saat digaruk terasa panas. Bahkan sampai berdarah. Saya pusing. Kadang digaruk pakai sikat. Saya obati dengan meminum rebusan daun,” kata Nahati.

Sumber air yang digunakan Ristan sekeluarga berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi penambangan nikel.

Nahati bermukim di Mosolo sejak umur lima tahun. Sepanjang usianya yang sekarang 65 tahun, ia berkata belum pernah mengalami penyakit gatal-gatal seperti saat ini. Dulu, air menjadi keruh hanya jika hujan deras berhari-hari. Tak seperti sekarang. Air berubah warna walau hujan sebentar. Kini keluarga ini terpaksa menggunakan air kotor. Tak ada sumber air lain. Agar bisa digunakan, air harus didiamkan sampai cukup jernih.

Di Desa Mosolo, nasib Tika pun sama. Ibu dua anak berusia 24 tahun ini mengeluhkan gatal-gatal. Kondisi tubuh An, anak Tika berusia 1 tahun, mirip dengan Abyan. Kulit jari-jari kakinya terkelupas. Pada punggung kaki ada bekas luka-luka berbentuk melingkar kehitaman. Awal Agustus 2023, Tika memeriksakan diri dan anaknya ke dokter di Kota Kendari.

“Kata dokter, tidak ada masalah dengan susunnya. Hanya dibilang mungkin pengaruh cuaca. Semua keponakan juga gatal-gatal. Saya sendiri gatal-gatal sejak bulan lalu.”

“Kita tidak pakai sumur bor. Hanya mengharapkan air dari mata air,” kata Tika.

Di Desa Sinaulu Jaya, Wa Muita tinggal bersama lima anggota keluarga, tiga



di antaranya perempuan. Ia mengalami gatal-gatal dalam setahun terakhir. Ini rentang saat perusahaan tambang melakukan penggalian nikel. Penyakit gatal-gatal yang dideritanya tak kunjung sembuh, sementara kebutuhan air rumah tangga pun berwarna cokelat saat hujan deras pada Mei 2023.

“Kita pakai mandi, mencuci, memasak. Pokoknya kebutuhan sehari-hari. Di sini sungainya

jauh. Kalau musim hujan, pasti merah juga.”

Wa Muita menderita gatal-gatal di beberapa bagian tubuhnya. Ia telah mencoba berbagai obat salep. Pernah berobat di puskesmas dan diberikan obat. Tak ada perubahan.

“Sudah berapa tablet kita minum, masih gatal-gatal. Mungkin karena air yang dipakai masih kotor. Jelas kita marah. Sebelumnya tidak pernah begini.”

“Awalnya muncul bintik-bintik merah. Kalau digaruk semakin gatal. Kita garuk sampai berdarah. Bahkan celana dalam kita berdarah-darah.”

Jumriati, warga Sinaulu Jaya berusia 24 tahun, khawatir sistem reproduksinya terganggu. Selain itu ia takut jika pertumbuhan anaknya berusia tiga tahun terganggu akibat terus-terusan mengonsumsi air tidak layak pakai.

“Harapannya, pemerintah bisa perhatikan keluhan kita di sini. Perhatikan masyarakatnya. Jangan biarkan masyarakat terdampak pencemaran tambang. Mereka raup keuntungan tapi kehidupan kami dikorbankan.”

Lahadi, penjaga penampungan air warga Sinaulu Jaya, membenarkan air mulai keruh dan kemerahan sejak perusahaan mengebor pada 2020. “Kita tidak bisa mendeteksi apakah pencemaran itu akibat aktivitas perusahaan atau bukan. Akan tetapi, ketika hujan selama satu hari, mata air mengalirkan gumpalan lumpur ke tempat penampungan,” katanya.

“Kita bicara begini bukan mengarang. Ada yang punya lahan di situ dan dia tahu persis bahwa lahan di sekitar itu telah dieksploitasi.”

Terkait dugaan pencemaran air, Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Konawe Kepulauan, Hasnawati mengatakan air yang digunakan warga Roko-Roko masih sesuai baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengujian dilakukan pada mata air Pamsimas Sukarela Jaya dan Pamsimas Dampo-Dampo Jaya.

“Untuk hasil lab yang kami lakukan dan diperiksa di laboratorium terakreditasi (laboratorium Kabupaten Kolaka), hasilnya masih sesuai baku mutu sesuai Permen LHK. Untuk sungai Mosolo, kami pantau sebagai bahan laporan ke KLHK,” katanya.

Hasnawati belum memperlihatkan hasil uji lab tersebut sampai artikel ini dirilis. “Ada sama staf saya,” katanya.

Muhammad Jamil dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), organisasi masyarakat sipil yang melakukan riset tentang gurita bisnis tambang nikel Harita Group, induk PT Gema Kreasi Perdana, berkata kasus gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya umum ditemukan di daerah tambang nikel. Di Sulawesi Tenggara, hal sama terjadi di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

“Setahu kami hal itu sudah diriset oleh kampus,” kata Jamil.

Penelitian La Maga, Ahyar Ismail, dan Faroby Falatehan dari Institut Pertanian Bogor (2017) di Tinanggea menemukan warga setempat menderita penyakit kulit akibat menggunakan air bercampur material tanah dari lokasi tambang nikel. Penyakit kulit umumnya diderita petani saat pengolahan lahan. Selain penyakit kulit, warga mengalami penyakit batuk akibat debu aktivitas penambangan maupun pengangkutan material nikel dari lokasi penambangan ke pelabuhan. Radius pencemaran udara ini sampai 3 km dari lokasi tambang nikel.

Mempertahankan Lahan

“Perasaan saya hancur melihat pohon cengkoh tumbang. Seperti melihat anak sendiri dibunuh,” kata Wa Muita, 43 tahun, warga Desa Sinaulu Jaya, mengenang peristiwa 10 Agustus 2023.

Sehari sebelumnya, warga desa menerima laporan bahwa kebun mereka yang terletak di bukit Mosolo, berjarak dua jam perjalanan, diterobos PT Gema Kreasi Perdana.

Sehari sebelumnya, Wa Muita dan suaminya, Amiri, menerima laporan bahwa kebun mereka yang berjarak dua jam perjalanan, diterobos pihak PT Gema Kreasi Perdana. Amiri bergegas mengecek kondisi kebun pada pukul 12 malam dan mendapati 40 pohon cengkoh yang sedang berbuah telah rata tanah. Selain cengkoh, perusahaan merobohkan 20 pohon merica yang baru belajar berbuah dan puluhan pohon jambu mete yang diperkirakan berbuah pada Oktober nanti. Saat ini harga merica Rp65 ribu/kg.

Wa Muita menyusul keesokan harinya pukul 6 pagi bersama 20-an warga. Mereka melihat pohon-pohon cengkoh berumur 18 tahun yang sudah jadi tumpuan ekonomi keluarga itu hancur seketika.



“Saya kehabisan kata-kata. Cuma air mata yang keluar,” kata Wa Muita.

Tak lama kemudian, ratusan warga memenuhi kebun Wa Muita. Warga mempertanyakan alasan penerobosan lahan. Namun, perusahaan beralih telah membeli lahan itu melalui orang lain. Wa Muita dan Amiri menegaskan tidak pernah menjual lahan apalagi

menerima uang hasil penjualan lahan itu. Situasi menjadi tidak terkendali. Warga dan pihak perusahaan hampir saling menyerang dengan senjata tajam.

“Setiap ke kebun saya tidak pernah lupa berbicara ke cengkik, ‘Tolong berbuah. Kita rawat kalian seperti anak sendiri. Kalian yang biayai saudara yang sekolah,’ tutur Wa Muita.

Wa Muita memiliki dua anak yang sedang kuliah; satu anak sekolah menengah atas; dan satu anak sekolah dasar. Biaya pendidikan empat anak itu bergantung pada cengkik. Pada 2019, hasil panen cengkik keluarga ini mencapai 1 ton. Harga pasar cengkik di Wawonii Tenggara saat ini Rp130 ribu/kg. Bagi Wa Muita, 40 pohon cengkik yang ditumbangkan itu sangat berharga.

Menahan diri dan berbesar hati, Wa Muita dan Amiri meminta PT Gema Kreasi Perdana tidak memperluas penyerobotan. Ada total 200 pohon cengkik di kebun mereka dan 120 pohon di antaranya telah berbuah.

“Kami ikhlas. Semoga perusahaan mau menyisakan sedikit hati nuraninya. Kami sudah meminta orang yang menjual lahan tanpa sepengetahuan kami untuk mengembalikan uang perusahaan.”

“Kami mau harap apa? Mau cari lagi di mana? Tidak ada. Ini lahan kami satu-satunya. Gaji kami hanya dari kebun,” kata Wa Muita.

Wa Muita pernah mempertahankan lahannya dengan berjaga di kebun selama empat bulan.

“Kadang mandi empat hari sekali. Hanya harapkan air hujan selama berjaga dari bulan Februari sampai Mei. Makan apa adanya. Saya berjaga dengan suami dan orang Mosolo lainnya.”

“Kita berjaga terus jangan sampai ada penerobosan. Ternyata, setelah kita turun dari kebun, pihak perusahaan lirik sudah tidak ada orang, perusahaan garap.”

Sebelum kehadiran tambang nikel, Wa Muita biasanya ke kebun dua kali seminggu. Kini ia terpaksa lebih sering ke kebun. Bergantian dengan warga lain untuk memantau situasi.

“Saya tidak tahu mau bilang apa. Ini sadis buat saya. Ngeri. Hancur perasaanku. Kenapa ada orang sejahat itu menerobos saya punya lahan? Mati-matian kita jaga, rawat, perjuangkan. Ujung-ujungnya diterobos. Setelah itu kita masih diancam juga mau digusur.”

“Saya berharap sama media atau siapa pun, tolong hentikan yang merusak ini.”
‘Kami Dibuat Terpecah Belah’

Belum cukup dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan tambang nikel, warga dibuat terpecah belah. Konflik tak cuma antara warga dan korporasi, tetapi merasuk ke konflik keluarga: antar-tetangga saling bermusuhan; orang tua dan anak saling membenci; sesama saudara tak lagi saling menyapa; suami dan istri bahkan sampai bercerai.

Situasi itu dialami Sanawia yang sudah tiga tahun tak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya. Konflik bermula saat salah satu saudara Sanawia menjual lahan warisan orang tua. Tindakan itu didukung sang ayah.

anah itu dijual saat Sanawia sedang demonstrasi menolak tambang di kantor DPRD Konawe Kepulauan pada 2019. Di perjalanan pulang, Sanawia mendengar kabar lahan orang tuanya telah dijual kakaknya.

“Saya hanya bisa menangis. Lahan yang dijual itu sudah diratakan. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi ke rumah orang tua.”

Sanawia tak tahu pasti berapa luas lahan yang dijual, tapi kebun itu bisa menghasilkan 3.000 buah kelapa sekali panen.

Sanawia memiliki lima saudara, tiga di antaranya pendukung tambang. Saat orang tuanya sakit, ia enggan menjenguk. “Dulunya saya paling dekat dengan orang tua, sekarang tidak lagi.”

Ibu dua anak berusia 45 tahun ini ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya, tapi “hubungan kita bisa diperbaiki asalkan tambang pergi,” tambahnya.

Aba, bukan nama sebenarnya, pria paruh baya, menyaksikan kesedihan putrinya ditinggal suami saat mengandung anak kedua. Menantunya menawarkan uang dari perusahaan sebagai ganti rugi lahan milik Aba yang dijadikan jalan hauling PT Gema Kreasi Perdana.

Aba pernah dibawa ke kantor polisi demi mempertahankan lahan. Karena itu, ia marah saat menantunya menyodorkan uang ganti rugi tanpa persetujuannya. Ia menolak uang tersebut dan minta dikembalikan ke perusahaan.

Saat hendak membangun rumah, si menantu meminta putri Aba mengutang. Putrinya menolak. Saat itulah si menantu mengungkit-ungkit soal uang ganti rugi lahan yang pernah ditolak Aba. Cekcok suami-istri ini berujung kekerasan dalam rumah tangga.

“Anak saya datang malam hari sambil menangis. Mata kanannya lebam. Saya berusaha mendamaikan. Sempat berbaikan. Tapi beberapa hari setelahnya, saat anak saya mencari kerang di laut, suaminya pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai hari ini,” kata Aba.

Kini putri dan kedua cucunya tinggal bersamanya. “Saya tidak akan pernah menerima uang perusahaan. Saya memang sudah tua, tapi saya memikirkan masa depan cucu-cucu saya,” kata Aba.

Sanawia dan Aba adalah warga Desa Roko-Roko. Dan di desa ini, perpecahan warga akibat kehadiran tambang bukan rahasia lagi. Beberapa orang yang saya temui mengaku enggan bersosialisasi dengan siapa pun yang tidak sekubu, bahkan sekadar bertegur sapa.

“Situasi sosial di Wawonii Tenggara seperti api dalam sekam,” kata Erwin

Suraya dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam diskusi publik mengenai kehancuran ekosistem Pulau Wawonii, belum lama ini.

Gugatan Hukum

Pulau Wawonii seluas 706 km² termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil sesuai Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km². Dengan demikian, sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut, aktivitas pertambangan tidak boleh dilakukan di Pulau Wawonii.

Ada 2.214 jiwa penduduk yang tinggal di Desa Dampo-Dampo Jaya (441 jiwa), Sukarela Jaya (550 jiwa), Roko-Roko (582 jiwa), Bahaba (160 jiwa), dan Teporoko (481 jiwa) yang terdampak penambangan nikel PT Gema Kreasi Perdana, sebut kelompok masyarakat sipil terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), JATAM, KIARA, Trend Asia, dan LBH Makassar.

PT Gema Kreasi Perdana mendapatkan izin eksplorasi bahan galian nikel dan mineral pengikat sejak 2007. Pada akhir tahun 2019, anak usaha Harita Group ini mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi seluas 850,9 ha. Seluas 707,10 ha konsesi perusahaan merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Perusahaan mendapatkan wilayah izin area proyek seluas 192,4 ha serta pembangunan terminal khusus di perairan Selat Wawonii seluas 13,3 ha.

Menurut kelompok masyarakat sipil, pengerukan tambang nikel hingga pembuatan dermaga untuk tambang dengan menimbun perairan di Wawonii telah merusak ekosistem mangrove, terumbu karang, dan perairan. Keruhnya sungai menyebabkan warga semakin sulit mendapatkan ikan. Dermaga perusahaan juga menyebabkan ikan menjauh. Aktivitas pengangkutan ore nikel yang menghasilkan debu tebal mengganggu pernapasan warga, sebut koalisi.

Koalisi menaksir korporasi telah melakukan pengapalan ore nikel lebih dari 100 kali untuk diolah di fasilitas pemurnian atau smelter milik Harita Group di Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara. Harita Group, berkantor pusat di Jakarta, merupakan perusahaan raksasa di sektor sumber daya alam, mulai dari bisnis pertambangan nikel, bauksit, batu bara, perkebunan sawit, perkapalan, dan perikanan. Perusahaan ini dimiliki keluarga Lim Hariyanto Wijaya Sarwono.

Sekalipun sudah dilindungi undang-undang, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Konawe Kepulauan 2021-2041 menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan di Konawe Kepulauan, Pulau Wawonii.

Warga Wawonii, yang diwakili firma hukum Denny Indrayana, mengajukan uji materiil perda tersebut. Pada 22 Desember 2022, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan warga.

Dalam putusan No. 57 P/HUM/2022, Mahkamah Agung menyebutkan Pulau



Wawonii merupakan “pulau kecil ... yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem ... termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity ... yang harus dilarang ... karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup.”

Mahkamah Agung juga menyebut Perda RTRW tersebut “... mengabaikan aspirasi masyarakat ... melalui demo besar-besaran pada 6 Maret 2019 ... menolak kegiatan usaha pertambangan.” Mahkamah memerintahkan Bupati dan DPRD Konawe Kepulauan merevisi Perda RTRW tersebut.

Namun, PT Gema Kreasi Perdana, diwakili direktur utamanya Rasnius Pasaribu lewat kuasa hukum Asmansyah & Partners, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung. Pokok gugatannya adalah pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k dalam undang-undang tersebut, yang intinya melarang aktivitas penambangan mineral.

Pengacara perusahaan menilai Mahkamah Agung menafsirkan kedua pasal itu sebagai “larangan tanpa syarat” atas kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong Pulau Kecil padahal perusahaan “telah memiliki izin yang sah”

sehingga “terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional dan ekonomi.”

Perusahaan, dalam surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi, menyebut telah mengeluarkan total investasi Rp37,5 miliar dan 77,3 ribu dolar AS sejak 2007, selain telah menyalurkan lebih dari Rp70 miliar atas pembayaran “pembebasan tanam tumbuh kepada masyarakat” sebagai “ganti untung” atas tanaman yang terdampak pertambangan pada lahan seluas 568 ha.

Perusahaan mengajukan permohonan perkara itu pada 28 Maret 2023. Berkas permohonannya pun sudah direvisi dan disidangkan pada 9 Mei. Mahkamah sudah menggelar sidang untuk perkara nomor 35/PUU-XXI/2023 itu pada 31 Agustus. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 12 September. Tahapan selanjutnya adalah sidang putusan.

Koalisi masyarakat sipil berpendapat Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak judicial review yang diajukan PT Gema Kreasi Perdana untuk menyelamatkan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia dari cengkraman industri pertambangan.

“Jika dikabulkan, aktivitas tambang tak cuma dilegalkan di Pulau Wawonii, tapi seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” Wildan Siregar dari Trend Asia mengingatkan. “Kerusakan ekologis hingga konflik sosial akibat perusahaan tambang yang tidak menaati Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 akan semakin masif.”

Sementara perusahaan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, DPRD Sulawesi Tenggara resmi menghapus alokasi ruang tambang di Pulau Wawonii. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tenggara 2023-2043, Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan sebagai kawasan perikanan terpadu.

Ketua Pansus RTRW DPRD Sultra, Fajar Ishak, mengatakan keputusan untuk meniadakan ruang aktivitas pertambangan di Konawe Kepulauan berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Putusan MA meminta Pemda Konawe Kepulauan untuk merevisi pasal alokasi tambang dalam RTRW kabupaten karena bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Keputusan (Mahkamah Agung) itu lahir di penghujung tahun 2022, maka kita tidak boleh membantah itu, sehingga kita tetap mempertahankan Pulau Wawonii menjadi kawasan perikanan terpadu dan tidak ada kawasan tambang di sana,” ujar Fajar Ishak dalam pembahasan revisi RTRW yang digelar di Hotel Claro Kendari pada 29 Agustus 2023.

Bantah Tudingan Pencemaran

Humas PT Gema Kreasi Perdana, Alexander Lieman, membantah perusahaan menyebabkan pencemaran lingkungan. Soal tuduhan polusi udara, katanya, perusahaan telah melakukan langkah preventif dengan cara memantau kualitas udara dan kebisingan secara rutin dua kali setahun, melakukan penyiraman jalan secara berkala, serta pengaturan kecepatan kendaraan operasional.

“Berbagai program ini kami jalankan sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan untuk menjaga kelestarian lingkungan Pulau Wawonii,” katanya.

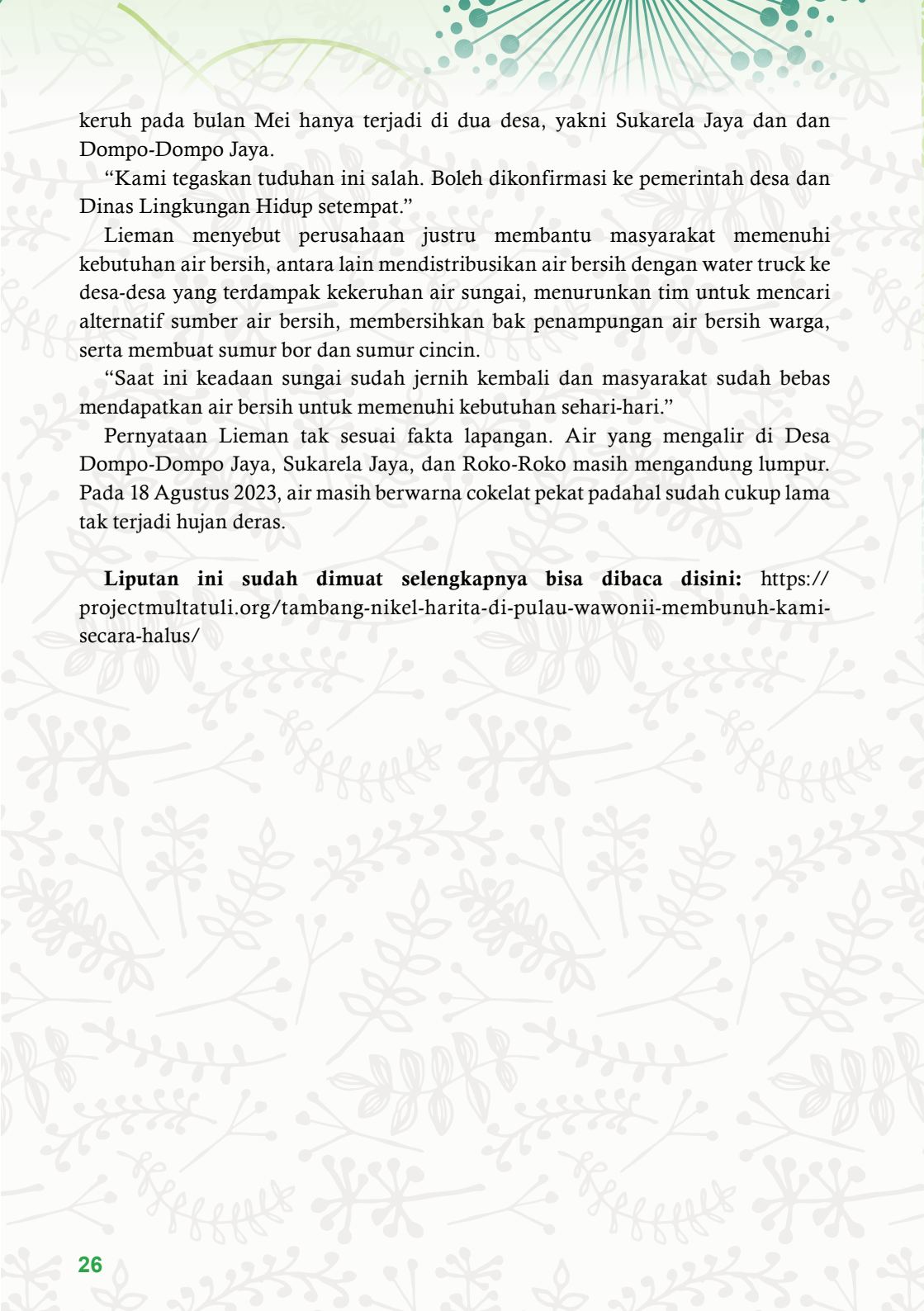
“Bahkan sebagai bentuk iktikad baik kami terhadap masyarakat setempat yang menggarap lahan di wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kami, telah kami berikan ganti untung tanam tumbuh,” katanya.

Lieman berkata perusahaan tidak menyebabkan pencemaran air. Sebelum ada kegiatan pertambangan, setiap curah hujan tinggi melanda Pulau Wawonii maka menyebabkan air sungai keruh.

“Kegiatan pertambangan kami tidak menyebabkan pencemaran sungai di sekitar areal pertambangan.”

Lieman juga menampik tuduhan pencemaran air warga Mosolo. Katanya, air





keruh pada bulan Mei hanya terjadi di dua desa, yakni Sukarela Jaya dan Dampo-Dampo Jaya.

“Kami tegaskan tuduhan ini salah. Boleh dikonfirmasi ke pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup setempat.”

Lieman menyebut perusahaan justru membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, antara lain mendistribusikan air bersih dengan water truck ke desa-desa yang terdampak kekeruhan air sungai, menurunkan tim untuk mencari alternatif sumber air bersih, membersihkan bak penampungan air bersih warga, serta membuat sumur bor dan sumur cincin.

“Saat ini keadaan sungai sudah jernih kembali dan masyarakat sudah bebas mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

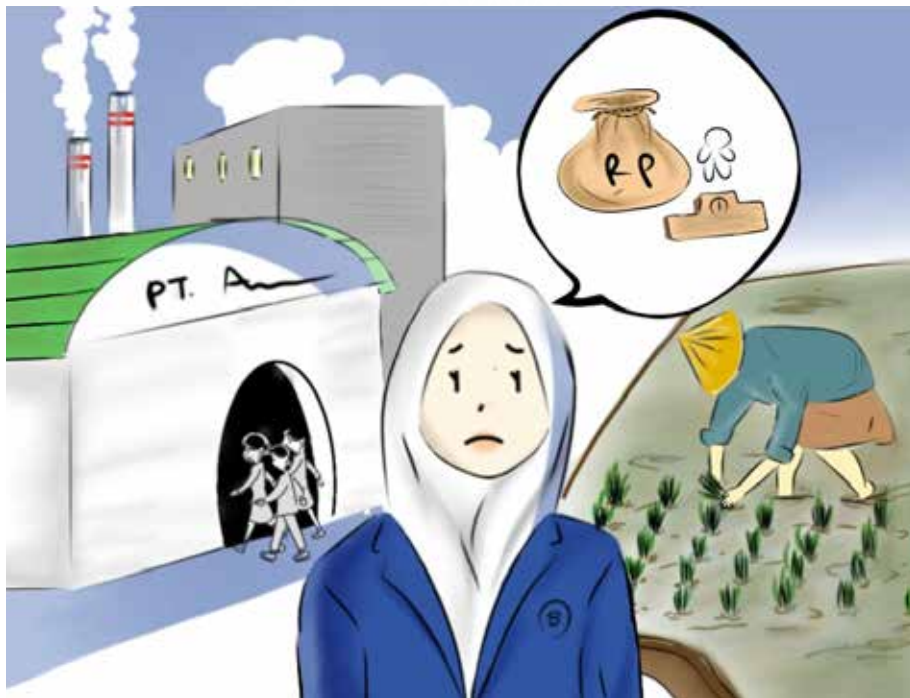
Pernyataan Lieman tak sesuai fakta lapangan. Air yang mengalir di Desa Dampo-Dampo Jaya, Sukarela Jaya, dan Roko-Roko masih mengandung lumpur. Pada 18 Agustus 2023, air masih berwarna cokelat pekat padahal sudah cukup lama tak terjadi hujan deras.

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://projectmultatuli.org/tambang-nikel-harita-di-pulau-wawonii-membunuh-kami-secara-halus/>

Survey: Mayoritas Mahasiswi di Yogyakarta Tak Mau Jadi Petani Karena Alih Fungsi Lahan dan Buruknya Pemerintah Kelola Pertanian

Pemerintah pernah mengungkap minimnya anak muda yang ingin jadi petani. Untuk melihat fenomena ini, Poros melakukan survey terhadap para mahasiswi di Yogyakarta mengenai ketertarikan mereka terhadap sektor pertanian. Hasilnya menunjukkan, sebanyak 53% menjawab tidak tertarik jadi petani karena tak bermasa depan, ada alih fungsi lahan dan buruknya kebijakan pemerintah tentang pertanian.

Siti Umrotus Sholichah



Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa petani saat ini berada pada krisis regenerasi atau minim anak muda yang mau jadi petani. Ini ditunjukkan dengan data bahwa 70 persen populasi petani di Indonesia adalah pada usia 45 tahun ke atas. Banyak anak muda tak tertarik jadi petani.

Fenomena ini juga terjadi di Yogyakarta. Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di 2022, persentase angkatan kerja di Yogyakarta didominasi oleh kelompok umur 60 tahun ke atas. Data ini juga menunjukkan tentang regenerasi petani perempuan yang jumlahnya sangat mengkhawatirkan dibandingkan jumlah petani laki-laki.

Menurut Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS2018) yang menjembatani sensus pertanian 2013 dan 2023 mengungkap bahwa jumlah petani perempuan di Yogyakarta sebanyak 182.202, sedangkan jumlah petani laki-laki sebanyak 433.175. Jika dikalkulasikan, maka persentasenya petani perempuan hanya sekitar 30% dibanding petani laki-laki, atau selisih jumlahnya mencapai 250.973 orang.

Dari dua klasifikasi di atas, mayoritas petani berusia di atas 40 tahun. Pada petani laki-laki, mayoritas petani berusia 45-54 tahun, yaitu sebanyak 117.993. Sementara pada perempuan, mayoritas petani perempuan berusia di atas 65 tahun, yaitu sebanyak 49.224 penduduk.

Sementara itu, dari data Bappeda DIY, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2020-2022 menurun setiap tahunnya sebanyak 2,23 persen. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 20,17 persen, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 17,94 persen.

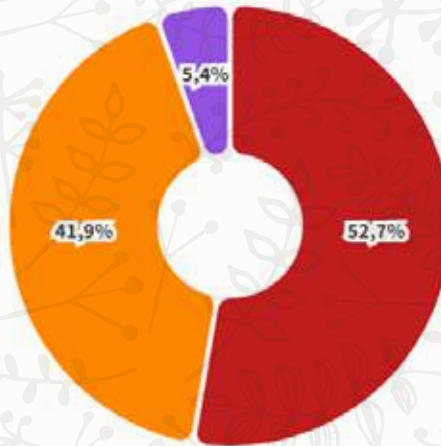
Pada laporan No.36/05/34/Th.XXV mengenai pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2023, BPS mengungkap bahwa sektor pertanian mengalami kontraksi pada triwulan I tahun 2023, yaitu sebesar 1,98 persen. Sementara itu, dibanding pada tahun 2022, ekspor pertanian di DIY menurun sebanyak 33,33 persen pada tahun 2023. BPS juga menunjukkan bahwa produksi padi di Yogyakarta selama Januari-Maret 2023 menurun sebanyak 4,66 persen.

Untuk melihat fenomena ini, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros melakukan riset terhadap mahasiswi-mahasiswi di Yogyakarta mengenai ketertarikan mereka terhadap sektor pertanian. Dari 93 responden yang mengikuti survey, sebanyak 53 persen menjawab tidak tertarik, 42 persen tertarik, dan lima persen eror.

Sejumlah pertanyaan dalam survey antaralain apakah tertarik bekerja sebagai petani, apa pekerjaan yang mereka impikan dan bagaimana tanggapan mereka terhadap banyaknya lahan pertanian di Yogyakarta yang tergerus oleh pemukiman dan kedai kopi.

Persentase Ketertarikan Bekerja di Sektor Pertanian

- Tidak
- Ya
- Eror



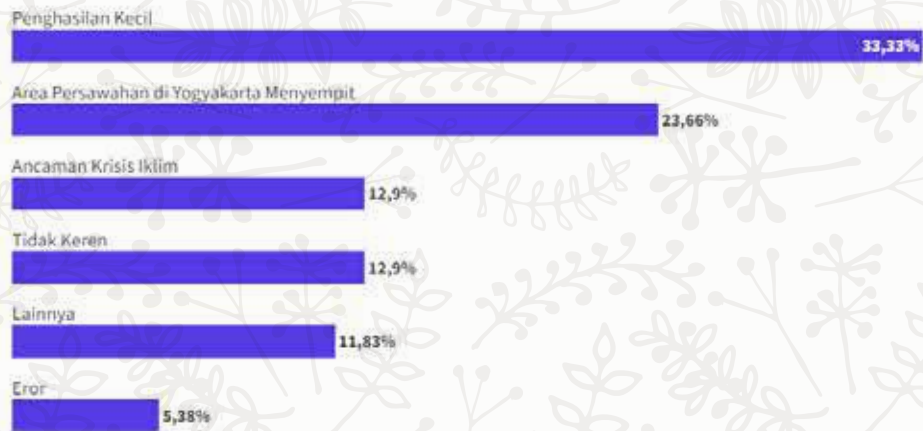
Source: Kuesioner, Google Form.

Dari survei yang dilakukan Poros ini, para mahasiswi di Yogyakarta enggan menjadi petani karena menganggap bahwa sektor pertanian bukan sektor pekerjaan yang menjanjikan. Sebanyak 33 persen responden menjawab bahwa sektor pertanian memiliki penghasilan yang kecil.

Selain itu, sebanyak 22 persen responden enggan menjadi petani karena lahan pertanian di Yogyakarta yang kian menyempit.

Selain itu, sebanyak 12 persen menjawab bahwa sektor pertanian bukan hal yang keren atau menunjang status sosial, lalu sebanyak 13 persen responden menjawab bahwa mereka enggan menjadi petani karena ancaman krisis iklim, dan 33 persen lainnya menjawab alasan lain, seperti tidak tertarik, tidak memiliki pengetahuan mengenai pertanian, hingga risiko gagal panen membuat mereka tidak tertarik dengan sektor pertanian.

Alasan Kurangnya Minat Bekerja di Sektor Pertanian



Google Form Kuesioner

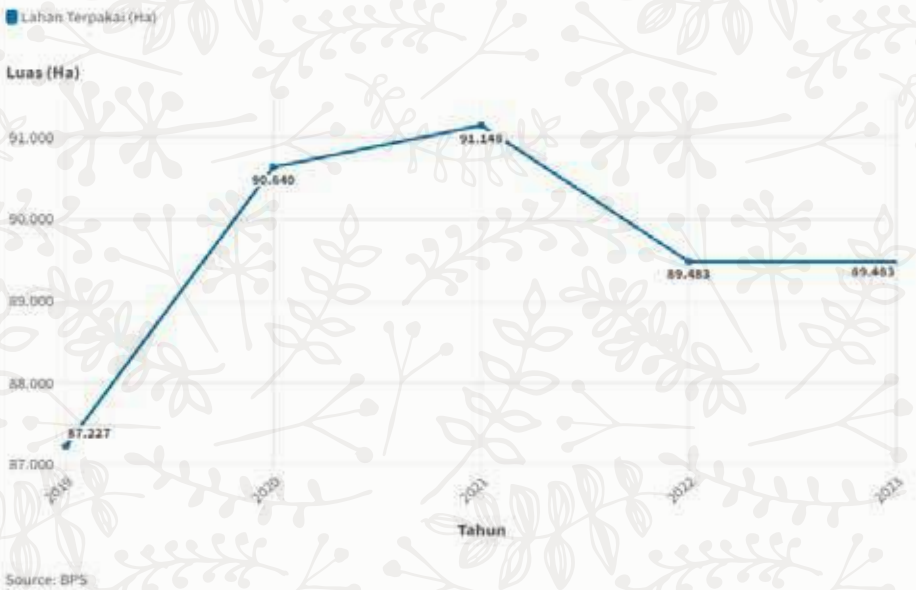
Penyempitan area persawahan karena alih fungsi lahan di Yogyakarta juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa mahasiswi di Yogyakarta enggan menjadi petani. Penyempitan area persawahan ini sering membuat ketahanan pangan di Yogyakarta menjadi terancam karena jumlah kebutuhan domestik dan produksi pangan tidak berimbang. Terlebih, mayoritas petani di Yogyakarta tidak dalam kondisi produktif bekerja, yaitu umur 65 tahun ke atas.

Selain itu, stigma bahwa sektor pertanian bukan hal yang menjanjikan masa depan bagi anak-anak muda juga menjadi faktor kuat mengapa sektor pertanian bukan hal yang mereka inginkan.

Ketidakinginan mahasiswi di Yogyakarta untuk menjadi petani diperparah dengan masifnya alih fungsi lahan di Yogyakarta. Menurut BPS, pelebaran area pemukiman di Yogyakarta cenderung berjalan fluktuatif. Pada tahun 2018, area pemukiman di Yogyakarta yaitu 87,227 ha, sementara pada tahun 2022 luas pemukiman di Yogyakarta sebesar 89.483 ha. Pemukiman di Yogyakarta juga semakin meningkat. Hal ini membuat permintaan kebutuhan domestik ikut meningkat. Menyempitnya area persawahan dan masifnya alih fungsi lahan menjadi area pemukiman dinilai mengancam pengadaan pangan di Yogyakarta.

Asri (22), seorang mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang menjadi salah satu responden survei ini ditemui Poros. Ia mengatakan enggan untuk menjadi petani. Menurutnya, sedari kecil orang tua Asri sudah merencanakan Asri untuk tidak jadi petani. Hal ini dikarenakan orang tua Asri merasa bahwa

Luas Pemukiman dan Perumahan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2023



pekerjaan menjadi petani adalah hal yang berat. Oleh karena itu, Asri akhirnya memilih untuk kuliah mengambil jurusan pendidikan.

“Dari orang tua sendiri ngarahinnya kalo bisa jangan jadi petani,” kata Asri ketika diwawancarai reporter Poros(4/8/ 2023).

Menjadi anak petani tidak mudah bagi Asri. Sebab, di daerah asalnya, Prambanan, tidak banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebanyakan dari mereka tamatan SMK atau SMA. Selain itu, Asri menerangkan, kebanyakan remaja di daerahnya memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik karena bekerja sebagai pabrik dianggap lebih bergengsi.

“Lebih ke gengsi,” ungkapnya.

Asri juga meresahkan banyaknya area persawahan di daerahnya yang dialih fungsikan menjadi destinasi wisata. Sehingga, banyak lahan persawahan yang tergerus. Kendati demikian, Asri mengamini jika pertanian adalah sektor yang penting bagi manusia. Terlebih, menurut data BPS, sepanjang tahun 2020 sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tidak mengalami resesi, bahkan meningkat sebesar 1,75 persen.

“Sampai sekarang masih resah, soalnya otomatis lahannya berkurang. Secara

konduktivitas dari warga jadi padat soalnya banyak pendatang baru. Selain itu, banyak yang kos daerahku memicu pembangunan yang lain, misalnya kayak buka warung,” terang Asri.

Petani Tetap Jadi Pekerjaan Perempuan di Desa Paska Menikah

Lebih jauh lagi, Asri tak menampik jika pertanian juga menarik perhatiannya. Selain untuk melanjutkan warisan orang tuanya, Asri menuturkan jika perempuan di daerahnya banyak yang menjadi petani setelah menikah. Menurutnya, pertanian menjadi pekerjaan sampingan perempuan di daerahnya selain mengurus rumah tangga.

Menurut data Sakernas 2022, perempuan selama ini melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dan hanya membantu orang lain tanpa mendapatkan upah, atau pada data sakernas diklasifikasikan sebagai perempuan yang bekerja di dalam keluarga tidak dibayar. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor paling tinggi, yaitu sebanyak 44,21 persen, diikuti sektor jasa sebesar 38,37 persen, dan sektor industri sebanyak 17,42 persen yang kemudian menjadi pekerjaan perempuan di luar mengerjakan pekerjaan rumah.

Ketika ditemui, Asri juga mengungkapkan bahwa permasalahan status sosial membuat anak muda di daerahnya enggan jadi petani. Menurutnya, alih-alih menjadi petani, anak muda di daerahnya lebih memilih untuk menjadi buruh atau pekerjaan lain.

“Tapi pada akhirnya, sekarang pekerjaan mandangnya pada ke *title*. Kalau semisal sekolahnya tidak serius, nanti berujungnya ke situ,” ungkap Asri.

Hal yang sama juga dialami oleh Delima, mahasiswi Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Yogyakarta. Ia mengungkapkan bahwa pertanian bukan sektor pekerjaan yang ia inginkan. Terlebih, di daerah asal Delima, Gunung Kidul, sering kali mengalami kekeringan. Hal ini membuat modal untuk keperluan air juga akan meningkat.

Sementara itu, Delima menerangkan jika kebanyakan masyarakat di Gunung Kidul enggan menjadi petani karena hasil yang tidak menjanjikan atau bisa untuk masa depan. Ia menerangkan jika banyak hasil pertanian yang harga jualnya tidak sesuai dengan modal awal. Sehingga, katanya, masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor lain.

“Jadi di Gunung Kidul itu kalau kering, kering banget. Jadi, kita harus sewa pompa (air). Nggak sesuai modal sama hasilnya,” ungkap Delima.

Delima menjelaskan jika seseorang di daerahnya mendapat warisan sawah, kebanyakan dari mereka lebih memilih menjualnya.

“Justru yang usia muda suka jualan tanahnya. Kan mereka dapat warisan, jadi daripada ngelanjutin lebih baik dijual aja,” jelasnya.

Delima juga menceritakan pengalamannya ketika beberapa kali ia main ke persawahan di Gunung Kidul. Ia menuturkan bahwa ia tak melihat anak muda bertani.

“Aku belum pernah lihat orang umur dua puluhan kerja di sawah itu belum pernah,” katanya.

Terlebih, Delima juga menceritakan pengalamannya berbincang dengan petani yang sawahnya terkena proyek pembangunan jalan provinsi. Ia mengungkapkan bahwa para petani lebih memilih untuk menjual sawahnya dan beralih profesi menjadi pedagang dengan mendirikan warung.

“Jadi orientasinya itu bukan menambah pangan, tapi orientasi setidaknya sama-sama menghasilkan uang. Beberapa juga dijual untuk bikin rumah,” ungkapnya.

Senada dengan Asri, anak muda di daerah Delima juga terjerat gengsi status sosial untuk menjadi petani. Menurutnya, anak muda di daerahnya menganggap bahwa petani ada pada status sosial yang rendah, sehingga mereka mencoba untuk bekerja di perkotaan guna mengangkat derajat sosialnya. Tambahnya, stigma ini memang menjamur di kalangan anak muda.

“Pertanian itu kan nggak bisa jadi ajang gengsi, ya,” kata Delima.

Lebih jauh lagi, Delima mengungkapkan jika anak muda di daerahnya lebih memilih untuk turun ke perkotaan dan bekerja sebagai buruh pabrik.

“Bahkan di dekat rumahku semuanya kerja pabrik, ada yang pabrik rokok, dan itu di bawah (perkotaan), *Iho*,” katanya.

Perempuan Dirugikan atas Macetnya Generasi dan Penyempitan Sawah

Perwakilan Solidaritas Perempuan Kinasih (SP Kinasih), Aniati yang dihubungi Poros, mengungkapkan bahwa macetnya regenerasi petani disebabkan karena minimnya kaderisasi terhadap anak muda.

“Dari sana, kami sadar bahwa kurangnya kaderisasi anak muda dan keterlibatan mereka (anak muda-red) dengan ibu-ibu petani kurang,” terang Aniati.

Macetnya kaderisasi ini, menurut Aniati, juga dikarenakan faktor internal seperti kehendak orang tua. Terlebih, orang tua yang berprofesi sebagai petani.

“Kadang, orang tua petani malah yang enggan anaknya jadi petani. Kalau kita tarik lebih jauh, presiden bisa saja menyarankan untuk jadi petani dan lainnya. Tapi, faktor terdekat itu (orang tua-red) paling berdampak,” terangnya.

Lebih lagi, Aniati juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor orang tua enggan anaknya menjadi petani adalah karena status sosial. Mereka menyarankan anaknya untuk mengambil profesi lain dengan alasan mengangkat derajat sosial.

“Banyak orang tua petani yang malah bilang ‘jangan jadi petani, jadi pejabat atau apa gitu’. Jadi, regenerasi petani juga macet,” jelasnya.

Aniati juga mengungkapkan bahwa ada ketimpangan dalam pendapatan dan modal untuk pertanian. Menurutnya, para orang tua petani seringkali kesusahan karena modal untuk pertanian yang besar, sedang hasilnya tak seberapa.

“Dari tanah sampai proses panennya segala macam itu butuh dana yang enggak seberapa,” kata Aniati.

Selain itu, Aniati menceritakan pengalamannya bersama ibu-ibu petani yang mengalami kerugian karena hasil panennya dihargai murah oleh tengkulak. Hal ini membuat petani menjadi pesimis dengan sektor pekerjaannya.

“Ada yang menjual berasnya ke tengkulak, terus ditawar sepuluh ribu, mereka bingung. Prosesku tu paling bagus, semuanya aku pastikan enggak pakai (bahan) kimia segala macam,” ungkap Aniati menceritakan pengalamannya.

Sebagai konsumen, Aniati juga menceritakan bagaimana pengalamannya bertemu dengan petani perempuan yang membuatnya berpikir mengenai keadilan bagi petani.

“Orang-orang bahas tentang pangan yang murah di Jogja, tapi kita enggak pernah kepikiran kalau beli dengan harga murah, petaninya dapat berapa,” terangnya.

Hal ini juga dialami oleh Delima. Ia mengungkapkan bahwa ia juga tak pernah tahu asal dari makanan yang ia makan. Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya *gap* pengetahuan.

“Semisal aku makan, aku juga enggak tahu nasi ini dari mana. Beda kalau kita menanam sendiri,” kata Delima.

Aniati juga menyoroti bagaimana seharusnya pemerintah memberi tempat kepada petani dalam pembuatan kebijakan mengenai pertanian dan pangan. Sebab, menurut Aniati, petanilah yang paling mengerti kondisi yang sebenarnya.

“Petani yang paling tau kondisinya. Pemerintah harus melibatkan petani dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Lebih lagi, Aniati menjelaskan bagaimana pemerintah tak melihat suatu permasalahan pangan dari akarnya. Menurutnya, ada kasus yang juga berhubungan dengan kondisi pangan, tetapi tidak dipikirkan sisi tersebut.

“Contoh pemerintah ngomongin isu stunting, kayaknya kita cuma dipermasalahkan isu stuntingnya doang. Tapi enggak dihiraukan masalah yang lebih mendalam. Apakah kualitas pangannya, kita enggak dikasih tau,” jelasnya.

Aniati juga menjelaskan bahwa perempuan menjadi pihak yang banyak dirugikan jika regenerasi petani berjalan macet. Terlebih, untuk perempuan yang mengurus kebutuhan rumah tangga karena permintaan domestik yang terus naik.

“Secara budaya, kita bekerja di sektor domestik, soal kebutuhan keluarga makan apa. Dari sisi ekonomi juga Perempuan paling mengerti suami dapat berapa dan harus diapakan dengan uang segitu. Itu paling berasa ibu,” jelasnya.

Hal ini juga dialami oleh Delima, ia menuturkan pengalamannya mengurus kerja-

kerja domestik. Ia merasakan ada lonjakan harga pada kebutuhan pokok. Kejadian ini membuat delima merasakan ancaman dari krisis pangan di masa depan.

“Aku juga banyak melakukan kerja-kerja domestik yang mikirin belanja, uang, dan lainnya. Dan aku berpikir, ‘wah ini makin mahal’,” ungunya.

Bagi Aniati, macetnya regenerasi petani mengancam ketahanan pangan di masa depan. Terlebih, bagi perempuan yang mengurus rumah tangga, ketersediaan pangan menjadi hal yang penting. Apalagi, regenerasi petani perempuan juga tak berjalan masif.

Aniati berharap bahwa pendekatan ke anak muda tentang sektor pertanian ini bisa dimulai dari lingkup terdekat, yaitu orang tua.

“Oke kita bisa bilang pemerintah bikin konten yang modern biar anak muda tertarik, tapi ternyata mereka (anak muda) lebih percaya ke orang tua dari pada kita yang orang luar,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa meyakinkan orang tua petani juga menjadi hal yang penting dilakukan. Lantaran, mereka menjadi orang terdekat bagi anaknya.

“Sekarang bagaimana kita meyakinkan petani kalau pertanian itu hal yang menyenangkan, bisa tahu apa yang kita makan,” tambahnya.

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://persmaporos.com/survey-mayoritas-mahasiswi-di-yogyakarta-tak-mau-jadi-petani-karena-alih-fungsi-lahan-dan-buruknya-pemerintah-kelola-pertanian/>

Tak Cuma Perempuan, Laki-laki juga Mengolah Sampah: Komunitas Pampers Mania dan Bank Sampah Rosella

Siapa bilang sampah hanya jadi urusan perempuan? Di Komunitas Pampers Mania, para laki-laki mengelola sampah pembalut dan pampers. Fermentasi sampah yang mereka hasilkan ini dilakukan karena kepedulian mereka terhadap sampah.

Hilda Putri Ghaisani



Tahukah kamu jika pembalut dan pampers merupakan sampah yang selama ini sulit sekali terurai? Kedua sampah ini kerap jadi momok para aktivis lingkungan karena butuh waktu 100 tahun untuk mengurainya.

Namun seorang relawan Komunitas Pampers Mania, Yoyok Adjid Soekarno kemudian membuat gebrakan baru soal mengolah sampah pampers dan pembalut ini. Olahan sampah pembalut sekali pakai ini kemudian dibuat pupuk cair. Yoyok selalu percaya bahwa tak ada sampah yang tak dapat diolah. Pampers hingga pembalut pun dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Uji coba awal ia mulai bersama rekan-rekannya yang kemudian berbuah manis. Ia bersama Komunitas Pampers Mania menggunakan metode fermentasi untuk mengolah sampah pembalut dan pampers.

Dalam sebuah Kongres Sampah Jateng yang diadakan 12 Oktober 2019 sebagaimana dikutip di Inilahonline.com, oleh Komunitas Pampers Mania, fermentasi pampers ini dibuat dari beberapa bahan dasar. Air kelapa sebanyak 2 liter ditambah gula 50 gram, probiotik 100 ml dan terasi 1 sendok teh. Untuk pampers yang diambil adalah bagian gel yang ada di dalam pampers. Untuk membuat fermentasi pampers, campur seluruh bahan selama 24 jam, kemudian masukkan pampers dan didiamkan selama 14 hari, lalu ditambah urine sapi. Hasilnya, bisa dijadikan pupuk.

Sementara untuk pampers yang telah dimasukkan sebagai bahan fermentasi, bisa dijadikan media tanam dengan perbandingan 1 banding 4 dengan tanah. Ini dilakukan untuk tanaman sayur dan buah.

Yoyok menjelaskan, hasil fermentasi ini dipraktekkan dari sampah pembalut dan pampers dan ternyata berhasil diberlakukan pada tanaman yang sering dijumpainya. Hasil buah akan lebih pekat warnanya, kondisi batang menjadi kokoh, dan tak perlu sering lagi menyirami tanaman sejak fermentasi ini diberlakukan.

Yoyok kala itu juga mengkampanyekan hasil ini dalam acara pameran yang dilaksanakan di hutan kota bertepatan dengan Hari Pungut Sampah Sedunia.



“Saat itu kita mengundang komunitas lain juga dengan maksud akan diliput oleh Metro TV, Indosiar dan lainnya. Dari itu lah ibu-ibu tertarik karena diliput TV itu kita gunakan sebagai kesempatan untuk mengenalkan dan berharap mereka dapat menerapkan di daerahnya masing-masing,” jelasnya antusias

Berkat tergabung dalam komunitasnya, Yoyok melihat beberapa penemuan olahan plastik pampers dan pembalut kemudian digunakan untuk pembuatan *paving blocks*. Pengolahan itulah yang membuatnya terketuk mengapa tidak sekalian saja mengolahnya secara keseluruhan, tak hanya diambil plastiknya saja.

Lalu siapakah Komunitas Pampers Mania yang menyelamatkan lingkungan dengan mengelola sampah ini? Tahukah bahwa kata Pampers di awal nama Komunitas ini

adalah sebuah singkatan dari Pasukan Anti Malas Pembersih Residu dan Sampah. Komunitas ini merupakan komunitas yang ada di sejumlah daerah tepatnya di desa-desa. Mereka kebanyakan adalah para laki-laki yang peduli pada sampah.

Dalam twitter @anakdesaid, komunitas ini juga memamerkan hasil fermentasi sampah pembalut dan pampers dalam sebuah pameran sampah di Semarang untuk dijadikan pupuk. Mereka ingin berkampanye bahwa sampah bukan lagi sesuatu yang bisa jadi momok dan menakutkan. Di Jawa Tengah, komunitas ini termasuk kelompok yang punya inovasi bagi lingkungan mereka.

Walau Yoyok bukanlah orang pertama yang sadar akan bahaya membiarkan begitu saja sampah pembalut berada di alam. Beberapa kenalannya ternyata juga telah melakukan percobaan fermentasi yang telah ia lakukan sebelumnya. Begitulah Yoyok akhirnya memulai aksi pengenalan kepada masyarakat terkait pengolahan yang ia pamerkan.

Terhitung telah tujuh tahun lebih atau sejak 2015, Yoyok mulai belajar mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang bagaimana kehidupan di alam dengan sampah yang akhirnya tak serta merta dibuang, namun dapat dikumpulkan dan diurai sendiri dalam proses pengolahan pupuk cair yang berguna bagi tanaman.

Pola pikir yang sama juga dirasakan Ngadiyono, Ketua Karang Taruna Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Inisiasi memberdayakan pengolahan sampah pampers dan pembalut pun menjadi siasatnya untuk



mengelola sampah.

Bermodalkan keresahan masyarakat yang selalu melihat beberapa potongan pampers dan pembalut di tepi sungai, hingga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa masyarakat disana sering membakar sampah pembalut ini.

Sebagai pecinta lingkungan, Ngadiyono merasa masyarakat belum peduli dengan sampah plastik, padahal jika ditilik lebih dalam, menurut riset Stockholm University, penguraian plastik dalam bungkus pembalut bisa membutuhkan waktu hingga 500-800 tahun yang berarti lebih lama dari penguraian sampah plastik botol yang memerlukan 70 hingga 450 tahun.

Sebab itulah dirinya merasa perlu menerapkan pengurangan juga penuntasan masalah sampah pampers dan pembalut ini. Ngadiyono berikrar bahwa penuntasan masalah sampah pembalut dan pampers harus selesai di daerah nya terlebih dahulu.

Tantangan Mengajak Masyarakat Peduli

Dalam waktu 1-2 tahun, masyarakat di lingkungan Ngadiyono kemudian mengikuti jejaknya. Hal ini sangat dirasakan Yoyok. Walau saat ini semakin hari dengan populasi pampers dan pembalut yang semakin banyak, ia mendapati bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Makin lama makin berkurang SDM yang mau mengelola sampah pembalut dan pampers ini

Mengingat idenya dirasa semakin ditinggalkan, Ngadiyono pun kemudian mencari jalan keluar dengan menginformasikan masyarakat bahwa sampah pampers dan pembalut yang mereka hasilkan di rumah masing-masing sebaiknya dikubur untuk menjadi media tanam saja. Ini ia sarankan agar lebih praktis dan masyarakat bisa menerapkannya.

Dikuburlah sampah tersebut di dalam tanah, kemudian diberi bibit yang ingin ditanam seperti pada umumnya. Tidak ada yang begitu berbeda, tetapi Ngadiyono mengungkapkan dengan metode seperti itu membuat tanaman lebih subur dan tak perlu lagi menyirami tanaman lagi secara berkala.

“Cukup tiga hari sekali tanaman dapat tumbuh lebih baik dari pada tanaman yang tidak menggunakan metode diatas.”

Idenya tersebut sebenarnya disambut baik oleh masyarakat terutama ibu-ibu. Namun, sedikit disayangkan semangat itu hanya membara di awal. Biasanya yang tertarik hanya ibu-ibu, namun yang lain maunya cepat, yaitu dengan membuang sampah ke sungai daripada mengolahnnya.

“Paling banyak terlibat ibu-ibu, mereka yang penting ada uang ada manfaat ibu-ibu pasti ikut,” tuturnya dengan tawa kecil di ujung percakapan. Maka inilah tantangan yang ia hadapi bersama komunitas pampers di sana.

Pilu Perempuan Parit Tokaya, Pontianak

Jika di Semarang, Jawa Tengah pengolahan sampah plastik pembalut dan pampers dilakukan dengan cara fermentasi atau ditanam di dalam tanah untuk pupuk, maka di Pontianak, orang mengolah sampah dengan sistem bank sampah. Pengolahan bank sampah ini juga tidak hanya dilakukan perempuan, tetapi laki-laki dan kepala desa mendukungnya dalam kebijakan desa.

Memasuki Kelurahan Parit Tokaya, berjejer rumah nan padat penduduk daerah bagian selatan Pontianak. Mereka mempunyai bank sampah yang cukup dikenal oleh berbagai kalangan. Konon banyak para mahasiswa tingkat akhir datang ke lokasi tersebut untuk mengambil data dan informasi terkait bank sampah ini.

Bank Sampah ini bernama Rosella. Bank Sampah Rosella berdiri di tengah masyarakat sejak tanggal 14 Juni 2013 silam, terhitung telah 10 tahun lebih bank sampah ini beroperasi. Tak pernah sehari pun terlewatkan sampah masuk ke Bank Sampah Rosella. Sampah dari masyarakat sekitar hingga sekolah dan perkantoran semua menyeter ke bank sampah ini.

Menariknya, Bank Sampah Rosella secara keseluruhan didominasi oleh pengurusnya yang hampir semua perempuan. Dari lima pengurus bank sampah ini, empat diantaranya merupakan ibu rumah tangga yang dengan sukarela menyisihkan waktu untuk melakukan pekerjaan sosial yang dulunya masih dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitar.

“Jangankan ada yang mau ikut, melirik saja mereka tidak mau,” ucap Tea Titalia dengan nada lirih

Tea Titalia selaku sekretaris Bank Sampah Rosella, seorang perempuan perawakan cukup tinggi dengan kacamata khasnya bercerita bagaimana kisah mereka memulai mendirikan Bank Sampah Rosella.

Dulu para perempuan ini merupakan kader Posyandu yang kemudian ditarik oleh lurah setempat untuk dapat bertanggung jawab atas keberlangsungan Bank Sampah Rosella. Sosialisasi satu persatu ke masyarakat mereka lakukan, dan kini seluruh masyarakat secara sadar mengirimkan sampah mereka ke Bank Sampah Rosella untuk bisa didaur ulang kembali. Lalu di bank sampah ini, sampah-sampah ditimbang dan mereka mendapatkan keuntungan dari sampah ini. Umumnya sampah ini dicatat dalam sebuah buku tabungan yang keuntungannya akan mereka ambil nanti.

Kerap kali masyarakat tak lagi memikirkan buku tabungannya, selama namanya telah tercatat pada bungkus luar sampah. Umumnya mereka percaya itu sudah masuk ke dalam catatan tabungan mereka.

Tea pernah merasa, ia dan anggota lainnya kekurangan kader dalam mengurus bank sampah. Namun mereka juga tak dapat menambah kader secara spontan begitu saja, harus dicari siapa yang benar-benar tertarik dan mau bekerja keras

mengelola sampah warga. Kedua anggota lainnya saat ini dirasa sedang tak dapat fokus pada bank sampah karena kesibukan berdagang dan merawat cucu mereka. Tea pun merasa jika hanya bertiga saja dirasa setengah mati harus terus bekerja mengolah sampah ini.

Tea menjelaskan bahwa dalam satu tahun ia perlu membagi sama rata profit yang dihasilkan oleh Bank Sampah Rosella ke seluruh anggota. Hasil yang sedikit tersebut menjadi kendala utama dirinya untuk mengajukan kader baru.

“Kami bukannya tidak mau untuk memberikan inovasi lebih atau ingin meningkatkan kualitas, tapi, ya karena kami orang-orang nya terbatas dan mempunyai pekerjaan utama lainnya,” begitu ucapnya penuh penekanan

Benar saja, Jerimin Direktur Bank Sampah Rosella yang juga seorang ketua RT mempunyai kesibukan lain. Begitu pula dengan istri Jerimin, Suryati yang secara ikhlas turut serta mengelola Bank Sampah Rosella. Namun setidaknya mereka mengetahui bahwa pengelolaan bank sampah ini didukung oleh para pengurus RT.

Selain mengelola bank sampah, Suryati juga punya keahlian sejak lama dalam bidang menjahit, maka tiap hari selain mengelola bank sampah, ia menjahit.

Suryati pun mengangguk pelan selama Tea bercerita, seakan membenarkan pernyataan sahabatnya tersebut. Kendati pengalaman selama mengelola bank sampah berat, Suryati dengan begitu tulus tak mengeluh demi keberlangsungan Bank Sampah Rosella hingga kini

“Semua itu karena sudah disini (hati), bapak tidak ada pun diusahakan saya lakukan sendiri,” ujarnya.

Jerimin memang terkadang jarang berada dirumah, ke luar kota selalu menjadi produktivitasnya. Jika ada pemasukan sampah yang perlu dijemput, terkadang anak lah yang membantunya. Menunggu anak kembali sepulang sekolah kemudian langsung bekerja membantunya, membuat Suryati lega masih ada yang bisa dimintai tolong.

Menghasilkan Karya dari Bank Sampah

Bank Sampah Rosella sendiri selain punya kegiatan mengumpulkan dan menabung lewat bank sampah, Rosella juga dikenal publik secara luas melalui beberapa karya originalnya yang terkadang diperjualbelikan. Mereka juga membuat karya dari sampah yang kemudian hasilnya dijual.

Mengolah sampah yang tak punya nilai hingga menjadi barang siap pakai yang berharga, begitulah sekiranya perbedaan Bank Sampah Rosella dengan bank sampah pada umumnya.

Ruang kerajinan yang mereka miliki pun berisi mayoritas sampah yang berhasil dibuat. Walaupun tak dapat memamerkan eloknya ruangan tersebut, Jerimin dengan sumringah menampilkan karya- karya buatan sang istri dan anggota Bank

Sampah Rosella lain yang berharga itu.

Seiring berjalannya waktu, Jerimin dan Suryati menyatakan sudah tak lagi seperti dulu yang dengan rajin mengolah sampah keringnya menjadi karya cantik karena beberapa sudah dikerjakan warga. Kini fokus mereka adalah pada sosialisasi dan pelatihan. Memberikan ilmu kerajinan tangan yang mereka kuasai dengan sendirinya membuat antusias orang lain untuk belajar dan membuat karya dari sampah. Terbukti pelatihan ini juga membuat antusiasme warga.

Mereka mulai belajar bagaimana cara membuat tempat pensil, celengan anak hingga *ecobrick* yang dijadikan sebagai tempat duduk. Mereka juga dengan senang hati menularkan ilmu mereka pada anak-anak yang haus ilmu kerajinan tangan ala Suryati dan Tea.

Pontianak Pos pernah menuliskan, Bank Sampah Rosella tak hanya memilah sampah, tapi juga mendirikan untuk membantu mengedukasikan dan mensosialisasikan tentang pemilahan sampah, khususnya sampah kering atau anorganik. Dalam sebulan lembaga ini bisa menyerap 500 kg sampah warga. Sampah-sampah tersebut kemudian dipilah mana yang bisa dikreasikan menjadi barang kerajinan mana dan mana yang cukup dijual dalam bentuk mentah. Kerajinan dari plastik misalnya bisa dijadikan berbagai toples, hiasan bunga dan lainnya. Sedangkan kertas koran dapat disulap menjadi tempat tisu, kotak penyimpanan, vas bunga dan lainnya. Begitu juga perca kain. Mereka yang mengerjakan adalah ibu-ibu warga sekitar.



Rupanya, Bank Sampah Rosella tak hanya bergerak membantu, tetapi juga bergerak mencuri *start* prestasinya sendiri karena sangat menginspirasi. Sejak terbentuk Bank Sampah Rosella telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya mendapat penghargaan inovasi kelurahan terbaik, memenangkan lomba nasabah terbanyak, hingga diikutsertakan dalam program kampanye lingkungan oleh pemerintah daerah.

Kemenangan tadi lah yang membuat rasa haru dan kerja keras Tea dan anggota lainnya sirna. Memang begitulah pihak pemerintah seharusnya mengikutsertakan mereka, Tea mengucapkan tidak lain tidak bukan untuk perangsang semangat dan energi baru kedepannya bagi para kader yang tersisa.

PT PLN - Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan (UPDK) Kapuas UIKL Kalimantan sebagaimana dilansir dari Pontianak Pos juga pernah menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Bank Sampah Rosella pada tahun 2020. Bantuan ini sebagai wujud dukungan pihaknya dalam membantu meningkatkan kemampuan warga dalam menciptakan produk kreatif bernilai jual sehingga bisa menjadi tambahan penghasilan. Selain itu program ini juga untuk mendukung pengelolaan sampah dan limbah warga karena ada nilai edukasi, ekonomi, kebersihan dan lingkungan hidup

Dari sini kita bisa melihat bahwa kepedulian terhadap sampah ini akan membuahkan hasil jika dilakukan bersama, tak hanya perempuan, tetapi juga warga dan pembuat kebijakan di lingkungan dan daerah mereka.

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://mimbaruntan.com/tak-cuma-perempuan-laki-laki-juga-mengolah-sampah-komunitas-pampers-mania-dan-bank-sampah-rosella/>

Ancaman Berlapis Krisis Sampah Bandung bagi Perempuan

Tata kelola sampah yang buruk di Bandung membuat perempuan ada di posisi terancam. Dari bau tak sedap, asap kebakaran, hingga sumber penyakit reproduksi.

Emi La Palau



Warga Desa Sarimukti membawa galon air bersih melewati jalan desa yang diselimuti kabut asap kebakaran TPA Sarimukti, Kamis (24/8/2023).
(Foto: Prima Mulia/BandungBerggerak.id)

Dari halaman rumah Hani Suprihatini (23 tahun), aroma tak sedap menusuk hidung. Sumbernya, tumpukan sampah yang sudah berbelatung. Sementara di samping rumah, dua anak perempuan Hani sedang asyik bermain, tampak tak menghiraukan bau menyengat itu.

Meski sedang mengandung delapan bulan, Hani tetap sibuk membantu sang suami memasukkan sampah yang telah dipilah ke dalam karung. Semua dilakukan secara cekatan dengan tangan kosong. Dengan wajah tak bermasker.

Rumah kontrakan Hani terletak tepat di dalam area Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Gedebage, Kota Bandung. Dia mengaku sudah terbiasa dengan bau tumpukan sampah. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kesehatan kandungannya.

“Nggak ada (kekhawatiran), udah terbiasa,” ungkapnya kepada Bandungbergerak.id, Senin, 21 Agustus 2023 pagi.

Terakhir kali Hani memeriksakan kandungannya dua bulan lalu. Bukan ke puskesmas terdekat, ia lebih memilih berkunjung ke bidan di daerah Arcamanik, yang berjarak sekitar lima kilometer dari rumah kontrakannya. Dia merasa lebih nyaman karena sejak anak pertama telah memeriksakan kandungannya ke bidan tersebut.

Dengan hasil penjualan sampah yang terus menurun, Hani mengaku memiliki kekhawatiran tentang biaya persalinan yang tak sampai dua bulan lagi. Bersama sang suami, dia masih berusaha untuk terus mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari sampah, yang juga dipakai untuk menutupi biaya dapur.

“Jual sampah susah, dan murah harganya. Turun terus harga sampahnya,” tuturnya. “Sekarang nabung aja.”

Hani tumbuh dan hidup bersama keluarga besarnya di TPS Gedebage. Anak ketiga dari lima bersaudara ini tinggal bersama orang tua dan seluruh saudaranya di rumah kontrakan yang sama. Mereka semua menggantungkan hidup dari hasil penjualan sampah.

Hani menikah saat berusia 18 tahun. Kini anak pertamanya sudah berusia lima tahun, dan anak keduanya berusia tiga tahun.

Mengganggu Siklus Haid

Di sebuah warung tepat di depan TPS Antapani di Jalan Indramayu, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Ipah (65 tahun) sibuk menggoreng bala-bala. Dapur warung itu hanya disekat oleh papan tripleks. Bergeser sedikit saja, bau sampah menusuk indra penciuman.

Warung Ipah memiliki panjang satu meter dan lebar setengah meter. Di sana, dia menjual gorengan, berbagai camilan, dan rokok. Bersama sang suami, Ipah juga tinggal di warung tersebut. Pelanggan utamanya adalah

pekerja TPS dan para tetangga.

Pada tahun 1985, tak lama setelah menikah, Ipah meninggalkan Majalengka untuk merantau ke Bandung bersama sang suami. Mereka berjualan di beberapa lokasi, termasuk Lembang, sebelum akhirnya mendapat tempat berjualan di lokasinya saat ini seizin pihak Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan sebagai pemilik lahan. Ipah membayarkan 25 ribu rupiah per bulan sebagai uang kebersihan serta 2 ribu rupiah per hari sebagai uang karcis.

Puluhan tahun hidup bersanding sampah, meski merasa sudah terbiasa dengan aromanya, Ipah mengaku kerap mengalami jarang haid. Dia juga harus menunggu lama untuk bisa memiliki anak pertamanya. Jarak keduanya sembilan tahun.

“Kalau dulu sebelum punya anak, mens langka, jarang. Tiga bulan lama nggak haid,” ujarnya. “Mulai jarang haid setelah nikah dan kerja di sini.”

Ipah memulai rutinitas kesehariannya sejak pukul satu dini hari. Dia pergi Pasar Cicadas untuk membeli berbagai bahan makanan yang akan dijual di warungnya. Pukul tiga pagi, Ipah sudah kembali ke warung dan segera membukanya untuk para pelanggan.



Warga kompleks City Garden Residence, Bandung, menolak rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Cicabe, Selasa, 22 Agustus 2023.

(Foto: Dokumentasi Warga)

Dari Bau 24 Jam hingga Ancaman Mikroplastik

Di permukiman padat penduduk di kawasan utara Kota Bandung, Silvi (32 tahun), bukan nama sebenarnya, bergabung bersama puluhan ibu-ibu kompleks City Garden Residen, Kelurahan Jatihandap, menggelar aksi di bekas lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cicabe sejak Selasa, 22 Agustus 2023. Mereka menolak rencana Pemerintah Kota Bandung menjadikan bekas TPA tersebut sebagai Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

Silvi dan perempuan lainnya sangat khawatir dengan dampak buruk sampah bagi kehidupan mereka. Jarak TPST Cicabe itu hanya 120 meter dari perumahan. Ditambah lagi, letak kompleks perumahan mereka di dataran rendah, sementara lahan TPST di atas perbukitan.

Silvi masih ingat betul apa yang terjadi ketika pada Mei 2023 lalu bekas lahan TPA Cicabe dijadikan tempat pembuangan sampah darurat selama dua pekan. Pemkot Bandung mengambil keputusan ini setelah TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat mandek beroperasi dan sampah menumpuk selama berhari-hari di sudut-sudut jalan di Kota Bandung.

Sebagai ibu rumah tangga, Silvi tak bisa bekerja mengurus rumah dengan napas lega. Bau menyengat asam sampah memenuhi seluruh ruangan. Masker yang dia kenakan tidak banyak membantu. Pekerjaan rumahnya terganggu. Cucian yang telah dijemur berbau tak sedap. Bau sampah terus melekat.

Truk-truk bermuatan sampah menyesaki jalanan sempit di kawasan Jatihandap. Air lindi berceceran, menimbulkan bau tak sedap. Sementara itu, lalat hijau bertebaran, memunculkan pemandangan kotor dan jorok di perumahan.

“Karena saya di rumah, jadinya bau itu 24 jam itu nggak ilang sama sekali,” kata Silvi, ditemui Rabu, 23 Agustus 2023.

Muncul juga kekhawatiran tentang limbah sampah akan masuk ke dalam tanah dan mencemari air yang digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari mereka. Banyak keluarga di permukiman sekitar TPST Cicabe yang menggunakan air tanah langsung karena tak terjangkau layanan air bersih PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Ditambah lagi, muncul juga ketakutan tentang bahaya mikroplastik yang sewaktu-waktu bisa mencemari air. Karena air dikonsumsi setiap hari, ia mengancam juga kondisi reproduksi perempuan.

“Kalau kayak gitu berarti nanti ada pengaruh juga kalau seandainya kehamilan ada janin,” ucap Silvi.

Menurut warga sekitar, wacana pengoperasian TPST Cicabe bergulir tanpa sosialisasi dan persetujuan mereka. Padahal mereka memiliki hak untuk menolak pembangunan demi lingkungan dan udara yang sehat, terutama untuk perempuan dan anak-anak.

Mendorong Pemerintah, Mengedukasi Warga

Sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang paling dikeluhkan warga Kota Bandung. Saat ini berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, volume sampah yang dihasilkan ibu kota Provinsi Jawa Barat ini mencapai 1.500-1.600 ton per hari, dengan lebih dari 50 persen di antaranya adalah sampah rumah tangga. Dari total volume sampah tersebut, sekitar 1.200-1.300 ton di antaranya dibuang ke TPA Sarimukti, sementara sekitar 200 ton lainnya diklaim telah berhasil diolah oleh masyarakat, baik lewat program Kawasan Bebas Sampah (KBS), bank sampah, maupun kerja pemulung.

Krisis sampah di Bandung terus berulang. Terkini, status darurat sampah ditetapkan setelah TPA Sarimukti terbakar pada Sabtu, 19 Agustus 2023 lalu. Api berkobar selama belasan hari, berimbas pada polusi udara yang mencekik napas masyarakat sekitar. Per Kamis 31 Agustus 2023 lalu, beberapa titik api masih menyala.

Imbasnya, pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti yang beroperasi di lahan seluas 43,6 hektare, dihentikan. Warga dilarang membuang sampah ke TPS. Di beberapa bidang jalan dan trotoar, ditemukan tumpukan-tumpukan sampah.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W. Paendong berpendapat, menimbang komposisi mayoritas adalah sampah organik, pemerintah seharusnya memprioritaskan pengelolaan ramah lingkungan lewat proses pemilahan sejak dari sumbernya. Kuncinya ada pada edukasi warga dan ketegasan aturan.

“Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau bisa dikerjasamakan dengan pegiat magot. Sampah organik akan tertangani. Sementara (yang) anorganik masih dapat dipilah dan didaur ulang. Sisanya tinggal residunya yang bisa dicarikan solusi lain,” ucapnya.

Ketua Yayasan Salam Institute Dwi Retnastuti mengungkapkan keprihatinan atas darurat sampah yang terus berulang di Bandung. Ini bukan lagi darurat, tapi sudah menjadi bencana. Salah satu pangkal masalah, menurutnya, adalah buruknya manajemen pengelolaan TPA. Dan dalam kondisi seperti ini, perempuan menjadi yang paling terdampak.

Dijelaskan Rena, demikian Dwi Retnastuti akrab disapa, perempuan masih menjadi aktor utama pengelolaan sampah domestik. Krisis yang terus berulang membuat mereka menjadi kelompok paling rentan yang harus memikul beban berlipat. Memikirkan tak hanya keselamatan diri, tapi juga keselamatan anak-anak. “Bebannya berlipat-lipat,” katanya.

Rena berharap, program pemilahan sampah bisa menjangkau seluruh Rukun Warga (RW) di Bandung. Yayasan Salam Institute sendiri, yang dia dirikan empat tahun lalu, bergerak dalam edukasi pengolahan sampah. Salah satunya lewat kerja



Dampak kebakaran TPA Sarimukti, TPS tutup di Kelurahan Merdeka, Bandung, Rabu (27/8/2023). (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

pendampingan ke masyarakat. Mulai dari arisan ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, hingga para pengepul sampah.

Menurut Rena, kerja pendampingan ini mendiskusikan juga dampak permasalahan sampah terhadap alat reproduksi perempuan. Yang disasar adalah perempuan-perempuan yang bekerja di tempat pengolahan sampah dan para pekerja yang mengelola bank sampah. Mereka yang bekerja di TPS-TPS memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan pada alat reproduksi.

“Itu sampai kami lakukan edukasi bagaimana pada saat mereka melakukan pemilahan sampahnya itu, posisi duduknya harus seperti apa,” tuturnya.

Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Ancaman

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Yudi Hidayat mengungkapkan, belum banyak riset di Indonesia yang secara khusus mengkaji bahaya limbah sampah terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Namun bukan berarti ancaman ini bisa disepelekan oleh masyarakat dan pemerintah selaku pengambil kebijakan.

Dijelaskan Yudi, polusi udara yang diakibatkan oleh sampah membuat para perempuan yang tinggal di lingkungan sekitar rentan terhadap berbagai penyakit. Sumber air yang tercemar oleh limbah juga berdampak buruk pada infeksi saluran reproduksi bagian bawah perempuan. Ujung rahim yang tersumbat akibat infeksi menyebabkan terjadinya fertilitas atau kemandulan.

“Kalau seorang ibu daya tahan tubuhnya rendah, infeksi ringan saja bisa menjadi berat,” tutur Yudi yang menjabat juga Ketua Perkumpulan Ahli Kandungan Indonesia.

Sampah juga dapat menyebabkan kanker pada saluran reproduksi. Dalam kasus ekstrem, sampah yang dibakar akan menimbulkan reaksi kimiawi yang memicu karsinogen sebagai penyebab kanker. Banyak kasus kanker serviks, menurut Yudi, ditemukan pada perempuan yang tinggal dan atau bekerja di kawasan-kawasan dengan mutu kebersihan rendah. Selain itu, sampah diketahui berpotensi juga menjadi sumber infeksi yang menyebabkan sumbatan-sumbatan pada saluran reproduksi.

Yudi mencontohkan bagaimana rentannya seorang perempuan hamil yang harus hidup dan tetap melakoni aktivitas hariannya di lingkungan dengan tumpukan sampah. Udara yang dihirup akan masuk ke bayinya. Apa yang dimakan oleh sang ibu, termasuk yang tidak higienis dan tercemar, akan masuk juga. Pertumbuhan bayi bakal terhambat.

“Hati-hati nih!” katanya. “Banyak zat karsinogen tadi kalau dihirup oleh seorang ibu yang sedang hamil nanti bayinya bisa catat kan?”

Perempuan yang hidup di lingkungan sampah rentan mengalami ketidaknyamanan atau bahkan kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan dari otak inilah yang dapat mempengaruhi ovarium indung telur untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan gangguan haid.

Malangnya, beragam ancaman dari bahaya sampah ini tidak banyak diketahui oleh para perempuan yang harus hidup di sekitar tumpukan sampah, TPS, atau bahkan TPA. Termasuk para perempuan hamil. Karena tidak tahu, mereka merasa baik-baik saja.

“Jadi mereka merasa nyaman dalam artian karena ketidaktahuan,” ungkapnya.

Diakui Yudi, dampak buruk sampah terhadap kesehatan reproduksi perempuan belum menjadi perhatian khusus, baik oleh pemerintah maupun para akademisi. Komunikasi di antara para pemangku kepentingan juga masih jauh dari efektif. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup memadai tentang dampak buruk sampah.

“Nah sekarang (pertanyaannya), pemerintah daerah termasuk Kota Bandung di dalam konteks pengelolaan sampah apakah sudah memperhatikan bagaimana dampak buruknya terhadap kesehatan reproduksi?” kata Yudi. “Saya yakin belum ke arah sana.”

Tidak Terakomodasi

Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dudy Prayudi menyebut pihaknya tidak hanya memikirkan dampak masalah sampah terhadap perempuan.

Tidak ada pengistimewaan. Semua kelompok masyarakat, dia klaim, ikut dipikirkan.

“Kalau secara khusus (dampak sampah ke perempuan), ya nggak lah. Kan kalau namanya sampah kan kalau tidak terkelola kan bisa menjadi sumber masalah lah. Tidak hanya buat perempuan, mungkin buat laki-laki juga, buat anak-anak juga, buat lansia, dan seluruh lapisan masyarakat. Begitu saya pikir,” ucapnya.

Dudi mengakui, belum ada upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk perempuan dalam pengolahan sampah agar terhindar dari dampak buruk. Menurutnya, jika sampah bisa diselesaikan sesegera mungkin, dampak buruk akan bisa dihindarkan. Lewat pemilahan, sampah organik dijadikan komposter, sementara sampah anorganiknya disertorkan ke bank sampah. Tersisa residu yang lalu dikirimkan ke TPS.

Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah masih jauh dari optimal. Darurat sampah terus berulang. Ancaman terhadap kesehatan reproduksi perempuan, terutama mereka yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lokasi pengolahan sampah, semakin nyata. Dan itu terjadi tanpa ada kebijakan khusus dari pemerintah bagi kelompok-kelompok rentan.

“Kembali lagi, sebetulnya kalau misalnya dari sumbernya sudah dipilah, ini justru akan bisa menyelamatkan semuanya, gitu lah,” tuturnya.

Ketua Yayasan Salam Institute Dwi Retnastuti menyebut peraturan daerah (Perda) tentang pengolahan sampah masih bersifat sangat umum. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan perempuan dan perlindungannya sebagai kelompok rentan belum terakomodasi.

“Kalau perlu, ada Perda khusus tentang pengolahan sampah dan (dampaknya bagi) perempuan karena ini penting banget juga,” ujarnya.

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://bandungbergerak.id/article/detail/158746/ancaman-berlapis-krisis-sampah-bandung-bagi-perempuan>

Perempuan Malagufuk Terpinggir di Tengah Pengembangan Ekowisata

Impian kaum perempuan berdaya di tengah geliatnya pengembangan ekowisata belum tergapai. Mereka tak sudi sekadar penghias di saat asap dapur harus mengepul menghidupi rumah tangganya. Butuh respons dan realisasi. Menanti segera dibekali agar kian berdaya saing di kampung Malagufuk.

Maria Baru



Mama Yakoba Kalami sedang mendorong gerobak berisi air ke rumahnya, kampung ekowisata Malagufuk, distrik Makbon, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (19/8/2023) lalu. (Maria Baru - Suara Papua)

Siang itu, Sabtu, 19 Agustus 2023, saya dan keponakan Santike, berkunjung ke kampung Malagufuk, distrik Makbon, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Mobil yang kami tumpangi berhenti di terminal penumpang Malagufuk. Turun dari mobil dan menunggu mobil lain untuk menuju ke kota Sorong. Kami tidak langsung melanjutkan perjalanan. Sempat rehat sejenak, sekira 30 menit.

Kami menarik napas dan membaringkan kepala yang agak pening akibat perjalanan darat. Angin sejuk menerpa dengan kicauan burung di kejauhan saling bersahutan. Mereka bernyanyi dari pohon yang satu ke pohon lainnya. Ditambah sejuknya udara membangkitkan semangat kami untuk menyusuri jembatan sepanjang 3.300 meter menuju kampung Malagufuk.

Saya dan Santike bergerak menapaki perjalanan kurang lebih tiga kilometer. Sepanjang jalan, mata kami dimanjakan pemandangan dedaunan hijau, coklat, kuning, dan merah. Berbagai jenis flora memajang sepanjang jalan. Pohon besar dan kecil bersemi di sepanjang jalan ke dalam kampung Malagufuk. Kami sungguh menerima hawa segar yang jarang dirasakan di kota. Burung kakak tua putih, hitam, dan Taon-taon bersorak ria. Suaranya melengking tinggi dan rendah. Pertanda mereka mendiami kampung ekowisata.

Tiba di kampung Malagufuk, kami menyaksikan berbagai jenis tumbuhan. Termasuk tanaman kebun, seperti pisang, jeruk, pepaya, rambutan, kelapa, dan bermacam lainnya. Di gapura selamat datang, seorang anak muda sedang memandu lima wisatawan manca negara (Wisman). Rupanya berasal dari Korea. Mereka mengabadikan indahnya pemandangan di dalam kampung. Juga, mereka memegang Binocular, alat teropong untuk meneropong dari jarak jauh burung beserta aktivitasnya. Memang, di sinilah para turis biasanya melakukan pengamatan burung (birdwatching). Kampung Malagufuk memang menarik bagi para wisatawan. Di kampung itu, alam hijau terhampar yang dihuni aneka satwa. Alam yang terpelihara tak terlepas dari system konservasi tradisional yang dikenal Egek, sebutan dari bahasa daerah Moi Kelim, warga yang mendiami kampung Malagufuk.

Sistem Egek diterapkan masyarakat adat Moi Kelim di utara kabupaten Sorong, terutama di wilayah Malumkarta Raya. Malagufuk masuk dalam kawasan Malumkarta Raya. Dengan Egek melarang siapapun berburu satwa liar dan menebang pohon.

Penebangan pohon boleh dilakukan hanya untuk kebutuhan membangun rumah warga. Jika untuk kebutuhan umum, kayu didatangkan dari luar kampung atau beli di kota. Begitupun ketika warga ingin berburu, harus keluar dari area konservasi. Mama-mama yang mau menangkap ikan hanya bisa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu memancing, bukan dengan obat-obatan.

Di sini masyarakat juga diperbolehkan memanfaatkan sagu di dusun sebagai



Gapura selamat datang di kampung Ekowisata Malagufuk, distrik Makbon, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (19/8/2023) lalu. (Maria Baru – Suara Papua)

pangan lokal, pengganti beras. Mereka tidak bisa membuka lahan kebun yang luas di dalam kampung. Hanya memanfaatkan pekarangan rumah buat tanam sayur, bumbu-bumbu, dan buah-buahan, seperti pisang, jeruk, dan buah jangka panjang lainnya. Masyarakat memiliki sistem adat untuk menjaga ekosistem alam dan isinya. Hal itu membuat aman beberapa hewan, sehingga masuk ke kampung dan hidup Bersama masyarakat, seperti Kasuari, Kangguru Pohon, dan burung Taon-taon.

Burung Taon-taon, misalnya, bebas masuk ke dapur warga untuk mencari makan. Masyarakat akan memberikan buah-buahan atau makanan yang ia suka makan.

Walaupun demikian, di balik keindahan kampung Malagufuk, mama-mama kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Mama-mama dan anaknya yang ingin berobat atau cek kehamilan harus menempuh jarak empat kilometer ke kampung Malumkarta.

Untuk bisa sampai di pusat layanan kesehatan, mama-mama harus mengeluarkan

biaya Rp50 ribu sekali jalan. Itu pun bila cuaca cerah. Jika hujan, mereka harus mengurungkan rencananya.

Karena itulah Margaretha Magablo, perempuan muda di kampung Malagufuk, bilang, warga setempat membutuhkan satu pos pelayanan kesehatan yang dibangun di Malagufuk. Dengan begitu mereka tidak harus ke Malumkarta.

“Saya biasa ke Malumkarta setiap tanggal 14 karena jadwal bidan periksa setiap tanggal 15. Ke sana diperiksa, dapat obat dan disuntik. Mama-mama sini biasa bawa anak ke sana, tapi kalo cuaca jelek, ya tra bisa jalan. Kita sekali jalan bayar lima puluh ribu rupiah. Sopir kalo baik hati ya bisa tiga puluh ribu,” tutur Margaretha.

Sulitnya warga setempat berobat diakui Margaretha. Karenanya, ia mau harus ada Posyandu atau perawat agar berobat tidak lagi pergi jauh seperti selama ini.

“Saya mau ada Posyandu atau ada perawat yang ditugaskan ke sini setiap bulan ataupun bisa tinggal di sini supaya masyarakat tidak harus ke Malumkarta atau Sorong. Misalnya ada tamu atau masyarakat yang sakit tiba-tiba bisa ditangani secepatnya,” Margaretha menjelaskan.

Selain itu, ia juga salah satu perempuan yang sering mendapat giliran untuk masak makanan bagi para wisatawan. Turis memberinya upah Rp150 ribu per hari, kalau setengah hari Rp100 ribu.

Syukur bila tamu menginap sampai empat hari. Kelompok ibu pasti akan mendapat Rp600 ribu. Kata Margaretha, uang tersebut dibagi rata kepada para ibu yang bertugas untuk masak di dapur.

Margaretha merasa penting sekali pemerintah daerah memberikan pemahaman



Para turis asing sedang memotret burung di ruas jalan kampung Ekowisata Malagufuk, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023) lalu. (Maria Baru – Suara Papua)

lebih mendalam kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan ekowisata berkelanjutan di kampung Malagufuk. Ia juga menghendaki mama-mama dibekali kemampuan berbahasa Inggris. Itu supaya mereka mudah berkomunikasi dengan turis asing.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata baru memberikan pelatihan tentang cara masak makanan untuk wisatawan, melayani serta merapikan homestay.

“Saya berharap ada pendidikan bahasa Inggris supaya kami juga bisa tanya tamu asing tentang makanan atau merespons pertanyaan mereka,” katanya saat dijumpai setelah istirahat di dapur khusus untuk masak makanan bagi para tamu pada siang hari.

“Kami juga mengharapkan ada pelatihan-pelatihan lainnya demi peningkatan kemampuan dan pemahaman dalam mengembangkan ekowisata di kampung ini [Malagufuk],” kata Magablo.

Sementara itu, Norce Kalami, juga warga kampung Malagufuk, bercerita, sejak ia hamil hingga membesarkan anaknya sudah tiga bulan, belum pernah menggunakan obat modern. Hanya memanfaatkan apotik alami yang ada di hutan Malagufuk untuk kesehatannya saat hamil hingga melahirkan.

“Saya melahirkan anak di kampung. Tidak pernah ke Malumkarta untuk periksa atau imunisasi. Saya hanya pakai daun dan kulit kayu sebagai obat saat melahirkan. Bayi begitu lahir, hanya pakai debu panas yang dibungkus dengan daun, lalu urut biar kuat.

Kalau batuk atau beringus, hanya gosok minyak dan minum ramuan,” tutur Norce.

Dina Titin Sumarni, kepala bidang Destinasi Pariwisata kabupaten Sorong, mengatakan, mereka belum adakan pelatihan khusus kepada ibu-ibu. Selama ini



Ibu Margaretha Magablo sedang memasak makanan untuk wisatawan di dapur khusus di kampung Malagufuk, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Minggu (20/8/2023) lalu. (Maria Baru – Suara Papua)



Mama Marice Su sedang menadah air di jerigen lima liter dari pancuran modern di kampung Malagufuk, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (19/8/2023) lalu. (Maria Baru – Suara Papua)

enam jerigen untuk memenuhi kebutuhan air di rumahnya. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan water closet (WC) bagi para tamu, serta kebutuhan masak dan minum.

“Mama bawa air buat tamu. Air buat dong (baca: mereka) punya kebutuhan di WC. Mereka mandi ke gasebo. Buang air kecil di rumah,” kata mama Yakoba sambil senyum melihatku dan mendorong gerobak dengan air menuju rumahnya.

Pencahayaan, listrik dan WC masih menjadi masalah tersendiri di kampung Malagufuk. Kepala kampung sementara, bapak Amos Kalami, merisaukan hal tersebut, karena warganya sering menghadapi kendala air, mandi cuci kakus (MCK), dan listrik.

“Kami butuh air masuk di rumah masing-masing. Masyarakat juga belum punya WC di rumah. Terus, kami juga butuh penerangan,” kata Amos.

Fasilitas penerangan di rumah menurutnya biasa disiasati dengan mengandalkan genset. “Bahan bakar biasanya kami beli di kota. Saya sering beli dua puluh atau

hanya memberikan pelatihan secara umum, seperti cara memandu para wisatawan.

“Kami belum kasih pelatihan khusus kepada mama-mama, tetapi pelatihannya secara umum. Ketika pelatihan di Sorong, kami melibatkan masyarakat. Kami belum ada program khusus untuk pelatihan kepada mama-mama,” kata Sumarni saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Jikapun telah menjadi kampung ekowisata, fasilitas kebutuhan primer warga, seperti air bersih di kampung Malagufuk tidak mudah diakses. Warga harus terlebih dahulu mengambil air dari sarana pancuran yang disediakan pengelola dari kota Sorong. Air tidak dialirkan ke setiap rumah.

Yakoba Kalami, warga kampung Malagufuk, harus dua kali mendorong gerobak dengan

lima puluh liter, bahkan lebih. Dua puluh liter biayanya dua ratus ribu lebih. Lima liter bisa dipakai dari jam enam sampe sebelas atau dua belas, lalu kami matikan genset,” bebernya.

Seperti warga lainnya, Amos Kalami pun menghendaki adanya pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Terutama pengembangan pengetahuan dan kemampuan, seperti pengelolaan kearifan lokal agar kemudian bernilai ekonomis dan menambah penghasilan mama-mama di kampung Malagufuk.

“Mama-mama perlu terus dilatih, dibimbing dan dibantu apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan ekowisata. Contohnya pengembangan Noken atau Koba-koba biasanya terlihat sederhana, dikemas lagi supaya lebih bagus dan kuat, sehingga nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi. Itu akan mendorong pemberdayaan perempuan yang lebih baik karena kemampuannya terus berkembang,” tutur Amos berharap.

Esau Kalami, salah satu tokoh masyarakat atau Tetua di kampung Malagufuk, menjelaskan, mula-mula kampung Malagufuk hanyalah sebuah dusun biasa. Sebelumnya, semua pemilik hak ulayat di kampung Malagufuk tinggal di kampung Malumkarta, distrik Makbon. Tetapi lantaran terjadi kesalahpahaman antar-keluarga, mereka memilih pindah tempat.

Pada 2014, Malagufuk dimekarkan menjadi satu kampung tersendiri. Masyarakat bermigrasi ke Malagufuk. Beberapa waktu kemudian, wisatawan mulai datang untuk mengamati burung.

Sejak saat itulah wisatawan yang gemar birdwatching makin banyak dari tahun ke tahun, meski sempat berkurang drastis di masa pandemi Covid-19 antara tahun 2020 hingga 2022. Tetapi, sejak Januari 2023, jumlah turis pengamat burung kembali meningkat. “Dulu di sini dusun saja. Semua masih hutan belantara,” Esau buka cerita saat ditemui di rumahnya.

“Kami semua dulu tinggal di Malumkarta, tetapi ada masalah keluarga, jadi kitong (baca: kami) bergeser ke Malagufuk sini.”

“Setelah buka perkampungan, ada turis asing datang. Lihat potensi burung di sini. Dia pulang dan saat itu tamu datang terus ke sini. Mulai dari tahun 2017 tamu ramai. Begitu ada korona, tamu kurang, tapi pas masuk tahun 2023 tamu ramai



Jembatan kayu terpanjang di Indonesia yang ada di kampung Malagufuk, distrik Makbon, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Jembatan ini telah diresmikan oleh bupati Jhony Kamuru pada 2 Juni 2021. (Maria Baru – Suara Papua)



Sejumlah turis saat aktivitas birdwatching di salah satu hutan kampung Malagufuk, distrik Makbon, kabupaten Sorong. (Dok. Nimbrod Kalami – SP)

sekali, jelasnya.

Bagi Esau Kalami, dengan ekowisata konservasi, warga masyarakat mendapat keuntungan. Hanya memang belum kecipratan rezeki, tetapi ekowisata dianggap salah satu tumpuan harapan masyarakat setempat.


“Dari ekowisata ini, kami ada uang sedikit. Bisa pakai beli minyak goreng, garam, vetsin, sabun, dan lebih ya bantu anak-anak untuk sekolah,” imbuh Esau.

Berbeda dengan data dari Torianus Kalami, yang mencatat ekowisata Malagufuk belum banyak memberikan pendapatan bagi mama-mama.

Torianus Kalami, salah satu intelektual muda dari suku Moi Kelim. Ia cukup lama berkecimpung di dunia lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sorong.

Torianus akui pendapatan mama-mama hanya dari jasa masak, membersihkan homestay, dan mencuci. Sedangkan hasil pertanian, belum mampu menopang perekonomian dan pangan sehari-hari dalam rumah tangga karena mereka hanya berkebun di sekitar pekarangan rumah.

Itu sebabnya, kata Torianus, perlu ada sinergitas dalam mendorong konsep baru



bersama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk mengelola potensi local lainnya, selain pengamatan burung.

Contohnya, Torianus sebutkan, pengembangan daun pandan menjadi Koba-koba dan Noken. Koba-koba adalah payung tradisional yang biasanya dijahit dengan bahan dasar daun pandan. Masyarakat kampung memanfaatkan daun pandan dan dianyam menjadi Noken. Itu bisa menjadi satu souvenir khas dari kampung Malagufuk.

Kata Torianus, jika buat Noken dari bahan kulit kayu, jelas tiap hari mama-mama akan tebang pohon. Apalagi kalau permintaan pasar tinggi. Sedangkan, jenis kayu tersebut tumbuh sendiri di hutan sekunder. Belum ada usaha budidaya.

“Memang pendapatan mama-mama masih kecil, karena hanya dari masak, cuci, dan cleaning service di homestay. Itu saja,” ujarnya.

“Pertanian belum memberi pendapatan dan mencukupi pangan dalam keluarga karena hanya bisa ditanam di sekitar pekarangan rumah. Jadi, selain pengamatan burung, memang harus ada konsep baru yang didorong oleh pemerintah daerah dan non-pemerintah untuk kembangkan ekonomi dan berdayakan mama-mama di kampung ini [Malagufuk],” Torianus memberi saran.

Hanya dengan begitu, diyakini, kaum perempuan di kampung Malagufuk bisa eksis menghidupi rumah tangga dan kian berdaya menggapai impian mereka seiring adanya pengembangan ekowisata.

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://suarapapua.com/2023/09/05/perempuan-malagufuk-terpinggir-di-tengah-pengembangan-ekowisata/>

Cerita Pengalaman Para Perempuan Muda Aceh Mengubah Kebiasaan Warga Lewat Aplikasi e-tikbroh.yak

Berawal dari keresahan terhadap persoalan sampah di lingkungan sekitarnya, Siti Manzila tergerak menciptakan aplikasi antar jemput sampah. Inisiatif tersebut mendorong warga mulai mengubah kebiasaannya.

Masya Pratiwi



Sosialisasi aplikasi e-tikbroh.yak kepada para peraih di Desa Alue Deah Teungoh, 07/10/2022 (Dok.e-tikbroh.yak)

Perempuan asli Aceh itu bernama Siti Manzilla Amalia. Ia biasa disapa Manzil oleh orang-orang di sekitarnya. Manzil adalah sosok di balik gagasan terbentuknya aplikasi antar jemput sampah non-organik, e-tikbroh.yak.

Tumpukan dan gunung sampah yang kerap ditemui, mengusik nurani Manzil. Ia berpikir sampah harusnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, bahkan dapat bernilai ekonomis dengan menyulapnya menjadi kerajinan-kerajinan tangan.

Dari potensi itulah tebersit ide di benak Manzil untuk membuat aplikasi antar jemput sampah. Ia berharap sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak berakhir dengan dibakar, menggunung di TPA, dan mengapung di lautan.

“Kakak pertama udah lihat sampah plastik, kayak SoKlin itu ternyata bisa diolah menjadi tas, dompet. Terus dari itu kakak kepikiran, di sekitar kakak tu kan banyak sampah saset kemasan itu dibuang dan bahkan dibakar gitu. Karena kebetulan kakak tinggalnya di daerah Sawang, di pesisir pantai ya. Disitu tu masyarakat sering buang sampah ke laut tu, paling enggak dibakar sampahnya,” jelas Manzil.

Ide Manzil ini sempat diragukan oleh Ibunya, lantaran kebiasaan masyarakat sekitar terhadap sampah selama ini.

“Ide kakak ni ditolak ni sama Umi kakak kan, langsung dibilang ‘masyarakat pasti nggak mau lah, nanti juga buang sampahnya ke laut dan nggak peduli’ kek gitu,” ujar Manzil meniru pernyataan Ibunya.

Gagasan perempuan berusia 22 tahun ini akhirnya menemukan jalannya melalui dosen program studinya, Rizanna Rosemary. Saat itu dosen cum peneliti tersebut sedang melakukan pengabdian masyarakat dengan mendampingi kelompok perajin sampah kemasan di salah satu kawasan Banda Aceh.

Ibarat botol bertemu tutup, gagasan Manzil sejalan dengan kebutuhan para perajin. Kehadiran aplikasi akan membantu para perajin atau penadah sampah lebih mudah memperoleh sampah yang akan diolah. Selain tentunya ikut andil dalam kebaikan lingkungan.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala yang kerap dipanggil Bu Izan tersebut mendukung penuh inisiatif Manzil. Ia menjadi pembimbing dalam merealisasikan aplikasi antar jemput sampah non-organik yang kemudian diberi nama e-tikbroh.yak itu.

Nama e-tikbroh.yak punya makna yaitu “e” kependekan dari elektronik, sedangkan “tik broh” diambil dari bahasa Aceh yang berarti membuang sampah, dan “yak” adalah sebuah ajakan semacam “yuk”. Jadi, e-tikbroh.yak adalah sebuah ajakan membuang sampah secara digital.

“Nama itu *emang* digunakan sebagai nama dengan bahasa lokal, dengan bahasa Aceh. Jadi lebih memiliki di masyarakat Acehnya,” ucap Manzil.

Mengatasi Berbagai Hambatan untuk Mewujudkan Impian

Membuat aplikasi ternyata bukan perkara mudah. Manzil dan timnya mesti menghadapi sejumlah hambatan. Rizanna mengaku hambatan pertama datang dari kampus yang mulanya telat memiliki program bank sampah dengan konsep tersendiri. Akibatnya kesulitan menemukan celah agar gagasan ini masuk ke program yang ada.

Selain dari kampus, tantangan juga datang dari dinas perhubungan. Dinas mengarahkan agar perencanaan diulang kembali sehingga memerlukan waktu cukup lama. Sementara di luar, sampah terus bertambah memenuhi pandangan mata.

“Kami pikir, ya kita nggak perlu terlalu nunggu apa yang di luar, karena di depan mata sampah itu kan terus dihasilkan gitu kan. Kalau kita nggak bergerak dari sekarang, ya nggak akan ini,” ucapnya.

Keberadaan para pemulung juga sempat membuat tim e-tikbroh.yak bimbang. Di satu sisi permasalahan sampah harus ditangani. Di sisi lain kehadiran aplikasi dikhawatirkan akan bersinggungan dengan kelompok pemulung yang menggantungkan hidupnya dari sampah.

“Kalau kita bisa dan menjadi tersistem seperti ini, mereka (pemulung) bisa jadi mitra kita gitu kan, bisa menjadi kurir, atau membantu kita memilah-milah,” harap Rizanna sambil sesekali membenahi posisi kacamatanya.

Selain hambatan non-materiil, Manzil menyampaikan mereka sempat mengalami kesulitan pendanaan. Pasalnya pengembangan aplikasi membutuhkan biaya besar belum lagi keharusan membayar pelanggan. Situasi ini sempat membuat tim yang identik dengan kaus hijau ini jadi goyah.

“Sempat terkendala di dana nih pas mau buat aplikasi. Kan untuk *ngembangin* aplikasi tu mahal ya, sampai Rp 23.500.000 kemarin. Jadi kayak bingung nih, sedangkan dana kami terbatas. Dan kalau misalnya kita buat aplikasi yang pas-pasan juga itu nanti takutnya sama aja kan, nggak jalan. Jadi, *emang* ada terkendala di dana, terus juga kami tu harus bayar pelanggan juga. Nah selain pemasukan kami mungkin belum stabil, tapi kami juga harus bayar pelanggan, itu juga butuh dana,” jelas perempuan muda penggagas aplikasi tersebut.

Ambisi besar dan kegetolan tim akhirnya dapat menyeruak kepelikan-kepelikan itu. Mereka menyusun proposal pendanaan dan menyebarkannya. Upaya itu membuahkan hasil. Mereka mendapat pendanaan dari Program Inovasi Produk Mahasiswa (PIPM), Hilirisasi Inovasi USK (HiU), Program Pembinaan Usaha Mahasiswa Wirausaha (P2MW) dan Pertamina Foundation.

Gagasan yang mulanya hanya bertengger di dalam kepala, akhirnya mulai dirajut pada 4 Desember 2021. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 18 Mei 2023

terbentuk struktur organisasi secara utuh dengan 25 anggota. Mereka terdiri dari 6 dosen, 13 lainnya adalah mahasiswa, dan melibatkan 6 volunteer.

Slogan “Bumi Sehat Dompot Aman” menjadi ciri khas aplikasi yang secara resmi akan diluncurkan pada September 2023 mendatang. Selain menerima pendanaan, program ini juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak. Di antaranya Natural Aceh, Pegadaian, kamiKita, Bank Sampah USK, Penyandang Disabilitas dari Children and Youth Disabilities for Change (CYDC). Tak ketinggalan perajin dari Gampong Alue Deah Teungoh yang berperan sebagai mitra.

Cara kerja aplikasi ini dimulai dari pemesanan pada aplikasi melalui fitur “jemput”. Lalu pengguna akan diarahkan untuk berinteraksi dengan kurir dan akan ditanyai lokasi rumah dan dokumentasi kondisi sampah yang akan dijemput. Setelahnya, akan diminta menekan menu order di tahap terakhir lalu pemesanan akan diproses admin dan akan ditentukan jadwal penjemputannya.

Mendorong Perubahan Kebiasaan Warga dan Libatkan Perempuan

Sebagai langkah awal untuk pengenalan sebelum diaplikasikan pada masyarakat luas, tim e-tikbroh.yak menjadikan Desa Alue Naga sebagai desa percontohan. Di desa yang berada di tepi sungai Krueng Aceh tersebut diadakan penjajakan awal dan edukasi mengenai sampah dan pengolahannya.

Sebelum nantinya proses jemput sampah dilakukan secara daring via aplikasi, tim e-tikbroh.yak melakukan uji coba dengan menjemput sampah secara manual. Kegiatan ini dijadwalkan dua minggu sekali, pada hari sabtu.

Sabtu, 4 Agustus 2023 lalu, saya mendapat kesempatan untuk ikut penjemputan sampah bersama tim e-tikbroh.yak dan dosen-dosen pendamping di desa percontohan tersebut. Selain penjemputan sampah, kala itu dilakukan simulasi penggunaan aplikasi agar kedepan masyarakat dapat mengakses melalui genggaman masing-masing.

Penjemputan sampah dan proses penimbangan dilakukan di gazebo yang bertengger di sisi kiri rumah milik salah seorang warga, yaitu Yusniar. Ia seorang ibu rumah tangga yang menjadi penggerak pelaksanaan di Desa Alue Naga tersebut. Dengan kerudung hitam sepanjang siku yang pinggirnya dihiasi renda berwarna krem, ia menyambut kedatangan saya dan tim e-tikbroh.yak.

Satu demi satu, tetangga perempuan Yusniar datang membawa tentengan masing-masing. Kantong plastik berwarna biru, merah, hitam dengan berbagai ukuran, serta karung goni dan lipatan kardus bekas serentak menghiasi pekarangan rumah Yusniar. Masing-masing kantong plastik dan karung goni berisi sampah-sampah nonorganik yang sudah terpilah berdasarkan kelompoknya. Sampah nonorganik yang dijemput pagi itu berupa botol plastik, bungkus deterjen, bungkus mie instan, sampah atom, dan kardus bekas.

“Untuk sementara, di e-tikbroh.yak kan buka kategori sampah itu ada jenis hvs, terus juga ada kardus. Terus juga ada ini, aqua, aqua gelas, sama aqua botol sedang, botol kaca, botol sirup, sampah atom. Terus juga minyak, minyak juga kami terima, minyak yang bukan goreng. Minyak jelantah nanti bisa diolah jadi biosolar. Terus juga ada saset-saset itu lah, saset rinso, kemasan-kemasan yang bisa diolah yang ada kilat-kilatnya gitu,” jelas Manzil, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Humas.

Kehadiran e-tikbroh.yak di Desa Alue Naga, terkhusus di Dusun Pariaman mengubah banyak kebiasaan masyarakat di sana dalam mengurus sampah. Yusniar mengaku setelah ada e-tikbroh.yak, kegiatan membakar sampah jadi berkurang.

Sebelumnya, sampah selalu dibakar karena mereka merasa tidak ada alternatif lain, terlebih lagi truk pengangkut sampah tidak melintasi dusun pariaman. Ditambah lokasi tong sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) berjarak sekitar 875 m dari rumahnya.

“Gak tahu mau buang sampahnya ke mana. Kayak kami kan gak ada yang datang, maksudnya di depan-depan rumah, misalnya yang ngutipin sampah kayak mobil sampah itu gak sampe kemari. Iya, harus jalan ke depan,” pungkas Yus.

Sebagai delegasi e-tikbroh.yak untuk desanya, perempuan berkulit sawo matang ini mengaku para tetangga perempuannya punya semangat lebih dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan. Keberadaan e-tikbroh.yak bukan hanya memberi manfaat berupa lingkungan yang bersih tapi juga pengelolaan sampah jadi baik. Ia juga mendapat keuntungan dari poin-poin yang bisa ditukarkan dengan emas.

“Kita bukan hanya untuk sekedar bisa membuang sampah kita kayak gitu, tapi selain sampah kita bersih di rumah, tapi kita dapat manfaatnya. Seperti dapat poin bisa ditukarkan dengan emas, apalagi mereka udah bekerjasama dengan pegadaian,” tutur Yusniar yang sesekali memegang buku tabungan sampah di pangkuannya.

Warga Desa Alue Naga yang aktif bergerak dalam penyeteroran sampah dan terlibat bersama e-tikbroh.yak seluruhnya adalah perempuan. Salah satunya Nurhayati, Ibu dari tiga orang anak perempuan ini menyampaikan dirinya punya kesadaran tinggi soal pengelolaan sampah dan kebersihan rumah. Sedari masih di bangku sekolah, ia mengaku sudah akrab dengan isu sampah, tepatnya pemilahan sampah organik dan nonorganik.

“Saya nggak, nggak terlalu memaksakan gitu, nggak. Kalau saya bisa berbuat, ya saya aja dulu. Kalau kita pribadi kan nggak mesti disuruh, kita bisa bergerak langsung gitu,” ujar Nurhayati.

Nurhayati mengatakan ia dan Ibu-Ibu lain di desanya senantiasa saling mengajak, mengingatkan, dan menyampaikan segala informasi tentang penanganan sampah termasuk penjemputan sampah. Program yang dikelola mahasiswa ini mengubah dirinya untuk jauh lebih peduli pada sampah. Penjemputan dua minggu sekali tersebut juga selalu dinanti untuk menyerahkan sampah-sampah yang telah dipilah

sebelum jadwal penjemputan.

“Udah tau, udah tau buat simpankan (sampah kemasan minuman). Kalau kemarin-kemarin mungkin langsung dibuang, kalau ini udah sadar sendiri. O iya ini untuk bawa nanti hari sabtu,” ujar perempuan dengan kerudung hitam tersebut.

Tidak hanya antar jemput sampah dan mengedukasi masyarakat, tim juga mengadakan kegiatan pembersihan pantai dengan menggandeng organisasi-organisasi di Banda Aceh lainnya. Pembersihan pantai dilakukan pada 4 Juni 2023 silam di Pantai Alue Naga, Banda Aceh.

Aksi untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini menghasilkan hampanan pantai yang bersih sejauh pemantauan pada 5 Agustus 2023 dua bulan setelah kegiatan. Kondisi ini tak terlepas dari himbauan mereka kepada masyarakat sekitar soal sampah dan keberadaan e-tikbroh.yak.

“Nah, sekarang setiap saya lihat itu nggak ada botol-botol. Makanya saya, karena waktu itu pas kami sambil *beach cleaning* ini kami bilang ke masyarakat, bapak-bapak misalnya ada yang buang sampah di buang di sini. Atau orang yang foto-foto bilang jangan di buang di situ, dikumpulkan saja, kami jemput dan kita bisa dapat poin. Jadi, menurut saya itu salah satu bukti keseriusan kami. Itu ada dampaknya. Jadi, mereka pun walaupun ya, untuk membakar masih dilakukan. Karena kan sifat kami ini kan juga belum bisa tiap hari kan, perlahan-lahanlah,” imbuh Rizanna di gazebo milik Yus, 5 Agustus 2023.

Perubahan Pada Anggota Tim, Tumbuhnya Kepedulian Lingkungan

Tidak hanya mengubah kebiasaan masyarakat dalam memandang sampah, lahirnya e-tikbroh.yak juga mendorong pengurus-pengurusnya makin dekat dan lebih menghiraukan permasalahan lingkungan.

Salah satu pengelola e-tikbroh.yak di bidang spesialis media, Fadhia Sahlaa menceritakan e-tikbroh.yak merupakan kegiatan sosial terkait isu lingkungan pertama yang ia ikuti. Ia menyadari setelah menjadi bagian e-tikbroh.yak ia lebih peduli dengan kebersihan lingkungan, bahkan ia tidak lagi ragu untuk mengutip sampah yang dilewatinya.

“Contohnya tu kalau ada sampah, misalnya di Blang Padang (lapangan di Banda Aceh) tu kan banyak yang ninggalin sampah, nah, biasa sekalian *balek* tu ambillah yang lewat jalan. Sebelum di e-tikbroh.yak, mana ada mikir sampah-sampah orang,” tutur Fadhia dengan disisipi tawa.

Salah satu perempuan muda pengelola e-tikbroh.yak ini mulai bergabung lewat penyusunan proposal P2MW. Ia mengaku setiap proses yang ia alami bersama tim memberi kesan lebih bagi dirinya.

Fadhia mendapat kenyamanan di dalam organisasi ini melalui interaksi antar anggota tim. Selain itu dosen pembimbing juga kerap melibatkannya dalam

sejumlah aktivitas. Ia merasa banyak kesempatan baru yang terbuka untuknya setelah menjadi bagian e-tikbroh.yak. Salah satu yang melekat padanya adalah kesempatan menjemput sampah.

“Kesannya, memang luar biasa kali, kek mana ya, banyak kali rezeki, banyak kesempatan, nyobain hal baru. Gara-gara e-tikbroh bisa kenal Bu Izan, jadinya Bu Izan tu sering ngajak gitu kalau ada ini itu, “yok”, “yok”, jadi banyak pengalaman baru. Alhamdulillah bisa membantu banyak orang. Paling berkesan di e-tikbroh, jemput sampah, itu baru pertama kali sih,” ujar mahasiswa Ilmu Komunikasi tersebut.

Keputusan Fadhia untuk masuk ke dalam tim karena pengaruh salah satu teman karibnya, Marini Koto. Di e-tikbroh.yak sendiri, Marini menduduki posisi sebagai Desainer Grafis. Perempuan asal Aceh Tengah ini memiliki ketertarikan pada isu lingkungan sejak ia kecil. Kegemarannya menonton film dokumenter National Geographic mengantarkan pada kesukaannya terhadap alam dan lingkungan.

Kepedulian Marini terhadap lingkungan seperti diuji ketika melihat gunung-gunung di sekitar rumahnya mulai sering terbakar hingga mengakibatkan lenyapnya pepohonan. Kegelisahan terhadap keadaan ini membawa perempuan kelahiran 2003 ini makin mendalami isu lingkungan. Marini turut aktif dalam serangkaian kegiatan lingkungan sebelum berkiprah di e-tikbroh.yak.

“Saya itu sering mengikuti kampanye-kampanye lingkungan dan aktivitas lingkungan, seperti menanam mangrove dan segala macam dari komunitas-komunitas yang saya ikuti selain E-tikbroh.yak. Itu kan ada tuh kegiatan yang berafiliasi itu antara satu sama lainnya nah, saya biasanya ikut ketika itu berbau dengan lingkungan. Kemudian saya juga ikut dalam sekolah jurnalis lingkungan yang tentunya sejalan dengan isu ini,” jelas penggemar aktivis lingkungan, Farwiza Farhan ini.

Dari kesempatan terjun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat yang dijabatani e-tikbroh.yak, Marini mendapati masyarakat pada dasarnya peduli dan mau menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Sayangnya, tidak ada fasilitas dan edukasi yang cukup. Kehadiran e-tikbroh.yak dirasa jadi jawaban dari hambatan-hambatan tersebut.

“Sebenarnya masyarakat juga *aware* dengan masalah lingkungan seperti sampah ini. Cuma mereka nggak tahu gitu, eh sebenarnya kampanye bisa diolah seperti apa ya? Dan sebenarnya sampah ini bisa dipilah seperti apa ya? Mereka mau, *cuman* mereka nggak tahu harus kayak gimana. Dan dengan adanya e-tikbroh.yak ini, tentunya sebagai apa ya, sarana ataupun fasilitas yang nggak *cuman* mengedukasi mereka, tapi membuat mereka untung gitu. Soalnya kan ada nilai ekonomi dalam aplikasi ini,” jelas Marini.

Mengenyam pendidikan di Banda Aceh menyadarkan Marini bahwa kondisi sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar sangat memprihatinkan. Hamparan pantai

yang membentang di Aceh sebenarnya punya potensi besar, tapi taburan sampah-sampah masih memenuhi tempat-tempat wisata. Marini juga mendapati di beberapa tempat tidak disediakan wadah pembuangan sampah.

“Kondisi sampah di Aceh ini sangat memprihatinkan ya, karena kan kita ketahui Aceh itu kan salah satu daerah yang sangat indah gitu. Dan sebenarnya keindahan pantainya Aceh itu lebih indah daripada Bali. Nah, sangat disayangkan ketika kita pergi ke tempat wisata, banyak sampah-sampah yang berserakan di pinggir pantai di pinggir jalan gitu. Bahkan di tempat-tempat tertentu tong sampahnya aja nggak ada gitu,” papar perempuan berusia 20 tahun yang mulai menerapkan diet plastik di kehidupannya.

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Marini merasa pemerintah perlu menerapkan aturan sampah terpilah pada setiap rumah. Jadi masyarakat dapat mengklasifikasikan sampahnya sebelum akhirnya dialihkan ke TPA.

Menurut Marini ini akan memudahkan para petugas pembuangan sampah untuk mengelompokkan sampah. Sampah yang bisa didaur ulang diserahkan kepada penadah dan dijual kembali.

Perempuan muda pengelola aplikasi e-tikbroh.yak ini merasa orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan tidak memikirkan dampaknya. Sampah yang hilang dari pandangan mata bukan berarti tidak lagi berarti apa-apa.

“Mereka menganggap ya oke sampah itu nggak ada di tanganku, ya udah masalah selesai. Padahal masalah nggak (selesai) sampai di situ, ketika sampah udah dibuang sembarangan, itu akan bertumpuk. Kemudian muncul penyakit segala macam gitu yang berakibat pada pencemaran air gitu. Bahkan di selokan itu kan banyak kan penumpukan sehingga penyumbatan parit segala macam, Nah itu tidak dipikirkan sampai sejauh itu,” ungkap Marini, miris.

Karena itu bagi Manzil penting untuk mulai peduli dan mengambil tindakan. Langkah awal dapat dimulai dari diri sendiri.

“Bumi ini semakin tua, semakin panas. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Terus juga orang kalau misalnya nggak ada perubahan, ya di mana-mana aja buang sampahnya, buang sampah ke laut. Dan kalau kita masih gak gerak, bakal gitu-gitu aja terus. Orang juga nggak peduli tentang buminya. Padahal kita yang tinggal di bumi,” pungkasnya.

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://detakusk.com/artikel/cerita-pengalaman-para-perempuan-muda-aceh-mengubah-kebiasaan-warga-lewat-aplikasi-e-tikbroh-yak>

Gajah Liar Masuk Kampung, Konflik Satwa Terjadi, Suami dan Istri Jadi Korbannya

Sejumlah laki-laki meninggal karena terinjak gajah liar. Konflik antara gajah dan manusia ini ditengarai karena maraknya perburuan liar, hingga pembakaran hutan, sehingga gerombolan gajah liar sering keluar hutan dan merusak tanaman petani.

Agus Susanto



Seorang pawang atau mahout menunggang gajah Sumatera jinak di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, Sabtu (4/7). [ANTARA FOTO/FB Anggoro]

Suara dentuman petasan memecah sunyi malam di pinggir hutan Way Kambas, Kecamatan Labuhanratu, Kabupaten Lampung Timur. Bola petasan yang pecah di udara mengeluarkan kilat cahaya memecah gelap sekejap waktu.

Namun fenomena yang terjadi pertengahan Juli 2023 itu bukan petasan yang menyambut tahun baru atau hari raya dengan pesta petasan, melainkan itu suara-suara perjuangan para petani yang sedang mengusir gajah liar yang merangsek tanaman mereka. Gajah-gajah ini sudah lama mendatangi kebun-kebun warga karena kehilangan tempat untuk hidup. Akibatnya, warga yang jadi korban.

Kondisi ini diduga akibat adanya perburuan ruang diantara gajah di dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas/ TNWK karena jelajah gajah yang luas hingga ke rumah-rumah warga.

Fakta di lapangan, yang melakukan pengusiran gajah liar yakni para laki-laki, namun bukan berarti tidak ada dampak bagi para perempuan terutama para istri. Suami mereka tiap hari harus berjuang mempertahankan tanaman dari gajah liar. Ada suami yang meninggal karena jadi korban terinjak gajah. Ada istri yang kemudian menjadi perempuan kepala keluarga setelah itu.

Pertengahan Juli 2023, Suara.com bertandang di kediaman Sulastris di Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Wajah Sulastris seperti menyimpan perasaan dendam dan trauma begitu dalam ketika bicara tentang gajah.

“Udah, saya kalau bicara gajah- gajah bikin saya ngilu, yang saya ingat suami saya meninggal karena gajah liar,” ucap perempuan 38 tahun ketika diminta keterangan tentang gajah liar.

Rumah Sulastris berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Depan rumah terdapat hamparan sawah sehingga sejauh mata memandang sudah terlihat rimbunan pohon hutan Way Kambas.

Meskipun agak berat, Sulastris akhirnya menceritakan peristiwa naas yang dialami suaminya.

Suaminya bernama Yarkoni, ia meninggal diinjak gajah saat menunggu tanaman yang tidak jauh dari rumah mereka.

Rabu 9 November 2022 malam, merupakan kenangan paling pahit bagi Sulastris dan anak- anaknya dimana kala itu, Yarkoni ingin mempertahankan tanaman dari gajah liar agar mendapat hasil panen yang maksimal. Namun justru petaka yang di dapat. Ia kebingungan ketika mendapat kabar bahwa suaminya pingsan.

“Sekitar pukul 20.30 saya dapat kabar dari suami saya pingsan diinjak gajah, yang ada dalam benak saya kaki gajah begitu besar, bagaimana kalau sampai menginjak tubuh suami saya,”cerita Sulastris dengan nada berat sambil matanya memandang jauh ke langit- langit rumah.

Sulastris seakan tidak berdaya waktu itu ketika melihat tubuh suaminya. Yarkoni

dalam kondisi koma di salah satu Rumah Sakit di Kota Metro. Melihat suaminya terbaring diatas bed pasien, lebih lagi mendapat kabar bahwa tulang kaki dan rusuk nya patah akibat injakan kaki gajah, Sulastrri kebingungan minta ampun.

“Selang beberapa jam dari perawatan medis dinyatakan suami saya meninggal. Hati saya begitu trenyuh, saya mau menyalahkan siapa, apalagi yang menyebabkan kematian suami saya seekor binatang, bukan manusia, secara hukum pun saya tidak bisa berbuat apa-apa,” jelas Sulastrri.

Paska kematian suaminya, perempuan berkulit sawo matang ini harus menjadi tulang punggung keluarga untuk kedua anaknya. Dengan memelihara tiga ekor sapi peninggalan Yarkoni, ia kemudian menjadikan sapi-sapi ini jadi modal dan tabungan untuk keperluan hidup dan sekolah anak-anaknya.

Setelah Yarkoni meninggal, mereka tidak dapat bantuan atau asuransi untuk menyambung hidup, baik dari pihak Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur juga tidak dapat. Yang ada hanya sedikit uang yang disebut uang tali kasih sebagai tambahan pelaksanaan doa paska meninggalnya Yarkoni.

“Tidak ada asuransi hanya dapat uang Rp. 10 juta entah dari mana, yang pasti uang itu diberikan oleh pihak Balai TNWK untuk tambahan pelaksanaan yasinan selama 7 hari,” terang Sulastrri.

Saat ini Sulastrri jadi perempuan kepala keluarga yang harus menghidupi 2 anaknya. Kematian Yarkoni seolah hanya menjadi sejarah kelam bagi keluarga mereka, karena kematian Yarkoni akibat diinjak gajah tak pernah dikenang sebagai korban atau pejuang yang menyelamatkan tanaman di lingkungannya dari gajah liar. Tak ada penghargaan atau balas jasa dari pemerintah untuk Yarkoni.

Siti Rokhayah juga mengalaminya. Para perempuan khususnya ibu rumah tangga yang ada di Dusun 1, Desa Rantau Jaya meronta dengan kondisi yang ada, yaitu dengan adanya konflik gajah liar yang selalu merangsek tanaman petani. Meskipun perempuan disana tidak berhadapan langsung dengan satwa dan hutan, tapi dampak yang tidak di inginkan juga dirasa oleh perempuan. Seperti setiap malam suami mereka harus menjaga tanaman dari pukul 19.00 hingga pagi hari.

“Dampaknya kami was-was, malam yang seharusnya bisa bersama dengan anak istri, suami harus bermalam di kebun, tapi semua itu demi utuhnya tanaman kami,”kata dia.

Karena setiap ada kerusakan tanaman akibat gajah liar, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ataupun pihak Balai TNWK seolah tidak mau bertanggung jawab seperti mengganti rugi tanaman yang dimakan gajah liar.

Sulastrri, sudah 7 bulan ini harus bekerja keras menghidupi dua anaknya. Sejak suaminya meninggal, dia harus bekerja sebagai buruh serabutan dengan

penghasilan tidak menentu, dengan penghasilan tidak lebih dari 50 ribu per hari untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Perempuan yang tinggal di Desa Tambahdadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur itu selain bekerja serabutan, setiap hari harus mencari rumput untuk pakan 3 ekor sapi.

“Selama suami meninggal saya buruh apa saja, terutama buruh buruh di sawah, sambil mencari rumput untuk pakan sapi peninggalan suami,” kata dia.

Apalagi kata dia, anaknya yang nomor dua masih usia 5 tahun masih membutuhkan banyak uang untuk keperluan sekolah, sementara anak pertamanya yang sudah lulus SMA sudah merantau mencari nafkah semenjak ayahnya meninggal.

Selama 7 bulan, ia merasa berat untuk mencari nafkah dan menghidupi anak-anaknya.

Persoalan yang dialami oleh petani penyangga baik kerugian materi akibat tanaman yang rusak atau dimakan rombongan gajah liar hingga ada korban jiwa sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Pengurus Forum Rembuk Desa Penyangga (FRDP) sudah sering melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ataupun dengan Balai TNWK.

“Sudah bosan kami mengusulkan permohonan agar petani yang tanamannya rusak akibat gajah bisa diganti rugi. Petani yang meninggal akibat gajah liar agar dapat asuransi tapi tidak pernah ditanggapi,” kata Pengurus FRDP Hutan TNWK, Prayitno saat di temui Jumat (11/8/2023).

Sebagai pengurus forum desa penyangga, tentu persoalan konflik gajah liar dengan petani belum ada solusi, artinya konflik tersebut masih terus terjadi. Persoalan sosial tersebut tidak hanya menjadi persoalan bagi laki-laki, namun kaum perempuan khususnya yang suaminya sebagai petani penyangga hutan juga merasakan dampak negatif.

“Ketika suami menunggu tanaman dari serangan gajah liar, tentu sang istri pasti merasa cemas karena sudah banyak fakta penunggu tanaman mati akibat serangan gajah liar,” kata Prayitno.

Kata Prayit, tidak ada pilihan lain selain pasrah dan berikhtiar dari persoalan-persoalan konflik gajah liar yang tidak kunjung menemui solusi.

Sementara Kepala Balai TNWK, Kuswandono menanggapi persoalan tanaman petani yang dirusak atau dimakan gajah liar menegaskan bahwa tidak ada anggaran dari pusat untuk ganti rugi tanaman ini.

Ia menyatakan, bukan berarti tidak ada perhatian kepada petani desa penyangga, bentuk perhatian yang sudah diterapkan oleh pihak Balai TNWK yakni dengan

melibatkan masyarakat desa penyangga masuk dalam keanggotaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan untuk perempuan dibentuk wadah Kelompok Wanita Tani (KWT).

Untuk KWT, kata Kuswandono mitra Balai TNWK sudah memberikan pelatihan pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan juga memberikan modal, berikut pendampingan hingga KWT bisa menjalankan usaha mikro nya secara kelompok.

“Banyak yang di lakukan ibu ibu KWT, seperti pengolahan madu, makanan ringan dari bahan bahan singkong, pembuatan batik baju dengan bahan alami,”kata Kuswandono.

Tujuan pemberdayaan kelompok perempuan tani tersebut, agar ibu ibu desa penyangga bisa memiliki sumber penghasilan sehingga bisa membantu pendapatan suami.

“Rata rata pelaku pemburu ketika tertangkap dan hasil investigasi kawan-kawan mitra mereka melakukan atas dasar kebutuhan ekonomi. Maka kami ciptakan warga penyangga hutan sebuah usaha kecil yang bisa menghasilkan uang,” kata Kuswandono.

Dalam kunjungannya ketika melakukan dialog bersama warga Desa Penyangga Hutan TNWK, di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur, Minggu (13/8/2023), Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menegaskan setelah 16 Agustus 2023 akan melakukan rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) bersama rekan rekan komisi IV.

Rapat kerja tersebut, Suku Dinas/ Sudin berencana akan membuat regulasi terkait ganti rugi tanaman yang dirusak gajah, hingga penanganan petani yang menjadi korban gajah liar.

“Jangan sampai terus terusan masyarakat kami, warga kami terus-terusan menjadi korban baik materi hingga jiwa akibat konflik gajah liar,” kata Sudin.

Ketua Komisi IV DPR RI tersebut juga akan membangun kanal permanen agar gajah tidak bisa keluar dari hutan, katanya politisi PDIP itu juga akan menganggarkan Rp. 10 miliar untuk pembangunan kanal.

Perebutan Lahan Antara Gajah dan Manusia

Data yang didapat dari Wildlife Conservation Society (WCS), dari tahun 2000 hingga 2023 petani yang meninggal akibat serangan gajah liar sebanyak 5 orang. Tercatat tahun 2000, ada petani bernama Jiwon yang meninggal di tempat kejadian Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara.

Selanjutnya tahun 2010 petani bernama Sumarjo warga Desa Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo, 2021 petani bernama Sutikno warga Desa Tegalyoso,

Kecamatan Purbolinggo, dan ke lima tahun 2022 petani bernama Yarkoni warga Desa Tambahdadi, Kecamatan Purbolinggo.

“Itu catatan kami dari 2000 hingga 2022 ada lima orang yang meninggal akibat serangan gajah liar,”kata Koordinator WCS Sugio, Senin (15/8/2023).

Kronolog nya semua sama, yakni ketika korban sedang menunggu tanamannya pada malam hari, dan rata-rata yang menjadi korban serangan gajah adalah laki-laki dengan usia diatas 45 tahun.

Sementara kata Sugio, alasan gajah keluar dari kawasan, di duga akibat adanya perebutan ruang di antara gajah di dalam kawasan hutan TNWK karena jelajah gajah yang luas. Mereka lalu pergi ke perkebunan warga.

Gajah tidak mengenal batas kawasan. Gajah pendatang yang sudah mengenal makanan pertanian yang siap saji, karena gajah memiliki sifat oportunistis yakni memilih mencari makan yang mudah.

“Selain itu gajah cukup mudah masuk ke lahan pertanian warga karena pembatas antara hutan dan peladangan hanya sebuah kanal yang mudah dilalui gajah liar,” kata Sugio.

Populasi gajah yang ada di hutan Way Kambas adalah gajah asli Way Kambas dan gajah pendatang hasil program tata limuman, yakni dari Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Utara, Lampung Barat dan Lampung Selatan.

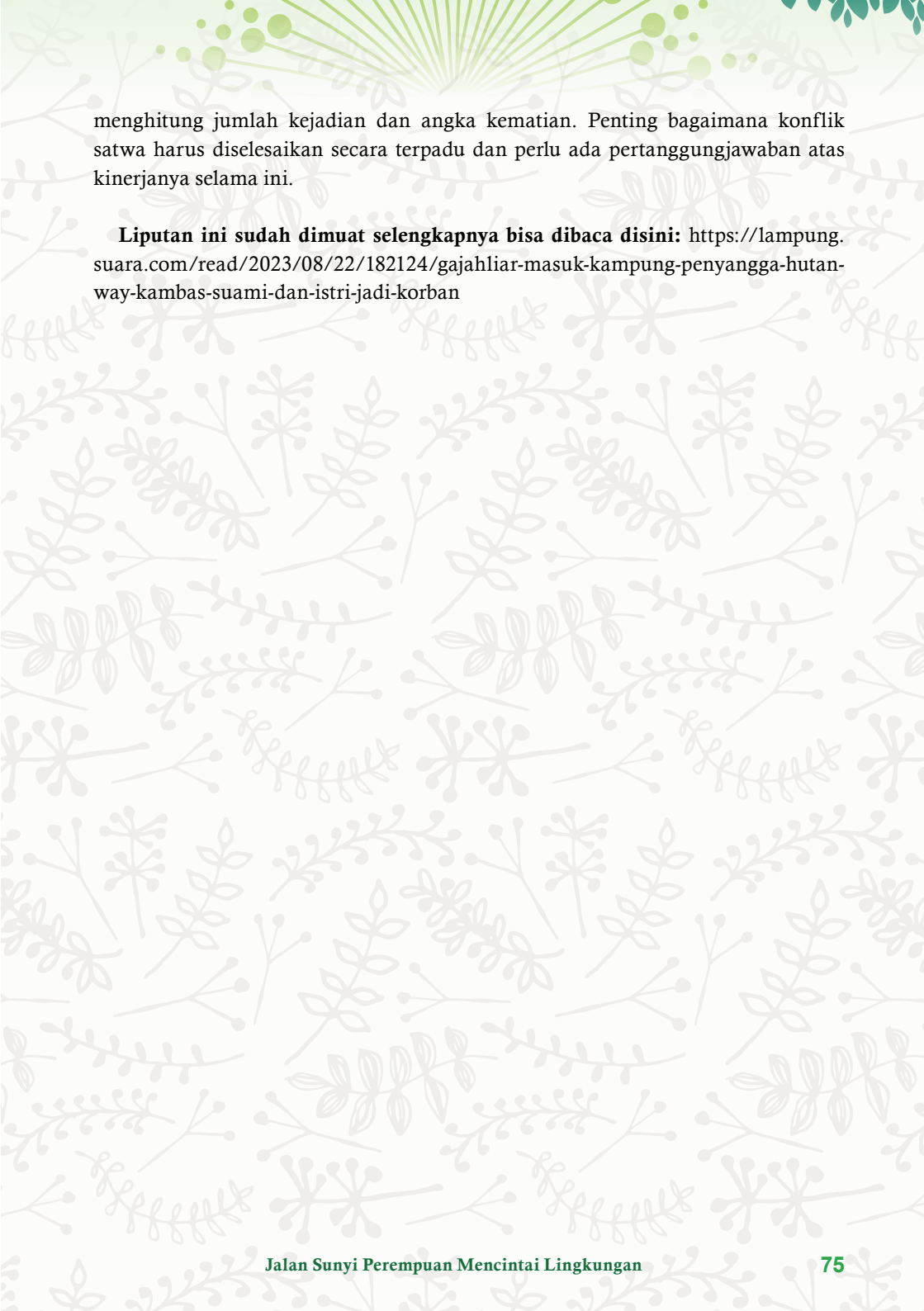
Sugio pun tidak menampik dengan adanya perilaku manusia yang melakukan kegiatan ilegal dalam hutan Way Kambas, seperti melakukan perburuan hewan jenis menangan dan sebagainya hingga peristiwa kebakaran hutan juga menjadi penyebab gajah liar keluar dari dalam hutan.

Perburuan satwa dan kebakaran hutan menjadi pemicu gajah berjalan menghindari lokasi yang rawan perburuan dan kebakaran hutan mencari lokasi yang aman, yang akhirnya keluar hutan dan masuk ke areal pertanian penduduk,” terang Sugio.

Sementara, secara umum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendapatkan data bahwa di sejumlah tempat seperti di Aceh, konflik satwa liar dengan manusia tak pernah berhenti. Ini diakibatkan karena tingginya alih fungsi hutan atau lahan dan banyaknya kegiatan ilegal yang terjadi di habitat gajah dan satwa liar lainnya yang merupakan penyebab konflik antara manusia dan gajah.

Di tahun 2014, Walhi pernah mencatat tentang konflik manusia dan gajah di Aceh. Walhi mencatat konflik terbesar yang terjadi antara satwa dan manusia adalah gajah.. Menurut WALHI Aceh konflik satwa dengan manusia terjadi terutama untuk gajah, karena jalur tempat tinggalnya diganggu.

Walhi mengkritisi kinerja lembaga konservasi perlindungan satwa yang lebih banyak melaporkan saat kejadian, seperti pemadam kebakaran. Seharusnya harus ada upaya yang serius untuk melakukan pencegahan sejak awal, bukan sekedar



menghitung jumlah kejadian dan angka kematian. Penting bagaimana konflik satwa harus diselesaikan secara terpadu dan perlu ada pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini.

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://lampung.suara.com/read/2023/08/22/182124/gajahliar-masuk-kampung-penyangga-hutan-way-kambas-suami-dan-istri-jadi-korban>

Terpaksa Bertahan: Warga Muara Angke Di Tengah Sulitnya Akses Air Bersih dan Kondisi Ibu Hamil Yang Rentan

Air bersih masih jadi kemewahan bagi warga Muara Angke meski berbagai upaya sudah ditempuh warga untuk dapatkan akses. Di tengah kondisi tersebut ibu hamil hadapi situasi rentan atas kesehatannya. Saat ini warga terpaksa bertahan.

Arrneto Bayliss



Di tengah kesibukannya memilah plastik bekas berwarna merah dan putih untuk menghias lomba Hari Kemerdekaan, ketua RT12/RW22, Muara Angke, Jakarta Utara, Juairiah bercerita mengenai kondisi air di wilayahnya yang buruk pada (16/8).

Sore itu, saat tim Didaktika mengobrol santai di teras rumahnya, Juairiah mengakui sampai saat ini warga masih sulit dapat akses air bersih. Juairiah berkisah warga terpaksa membagi tiga jenis air untuk keperluan sehari-hari. Pembagian jenis air ini disebabkan oleh perbedaan kualitas. Tiga jenis air tersebut berasal dari sumur, Perusahaan Air Minum (PAM), dan kemasan isi ulang.

Air sumur paling mudah didapat dan sering digunakan warga. Warga memakainya untuk keperluan mandi, mencuci pakaian, alat makan dan masak. Namun warga harus rutin mengecek karena kondisi air sumur dapat berubah-ubah. Jika air sumur berubah warna jadi lebih kuning, bahkan timbul bau, warga tidak dapat menggunakannya.

Juairiah menjelaskan ada faktor lain yang membuat warga harus berhenti menggunakan air sumur, yaitu aksesnya. Jemari telunjuknya memberi tahu jalur pipa sumur dari musala yang terhubung ke rumahnya terkadang mengalami masalah, mulai dari aliran kecil hingga mati total. Walaupun tidak sering, ia mengaku terganggu karena perbaikannya dapat memakan waktu sekitar satu sampai dua hari.

“Ya walaupun banyak kendala, air sumur dari musala tetap menjadi pilihan pertama karena harganya lebih murah, sebulan hanya seratus lima puluh ribu rupiah. Warga sudah banyak yang pakai, ada sekitar 40 sampai 50 rumah,” tuturnya sambil mengawasi anak sulungnya menghias bendera.



Sementara air PAM dipakai untuk mencuci pakaian dan memasak. Ini lantaran kualitas air PAM bagi Juairiah lebih baik ketimbang air sumur. Sedangkan air kemasan isi ulang, punya kualitas terbaik karena dapat langsung dikonsumsi.

Juairiah mengajak tim Didaktika ke rumahnya untuk merasakan langsung perbedaan antara air sumur dengan air PAM. Ia beranjak ke dapur untuk mengambil dua baskom berwarna pink dan biru. Baskom berwarna pink diisi air PAM dari

teras rumahnya. Sedangkan, baskom berwarna biru berisi air sumur dari kamar mandi. Setelah kedua baskom terisi, Juairiah mempersilakan tim

Didaktika untuk membandingkannya. Kami mencelupkan tangan ke dalam dua baskom tersebut untuk merasakan tekstur airnya di kulit. Adapula, kami juga mencium, dan mencicipinya.

Air sumur dalam baskom berwarna biru punya tekstur licin di kulit, berbau tanah, dan rasanya tawar bercampur sedikit masam. Sedangkan, air PAM di baskom berwarna pink punya tekstur kesat di kulit, sedikit berbau tanah, dan rasanya tawar.



Menurut Juairiah air PAM lebih baik karena warnanya jernih, tidak berbau, dan per jeriken lima liter dihargai seribu lima ratus rupiah. Sayangnya, warga terkendala oleh jarak saat harus pergi mengisi. Ini lantaran tidak meratanya persebaran toren air PAM di RW22.

Dari RT1, 2 dan 11 mendapat sebuah toren PAM. Sedangkan, RT12 mendapat lima toren PAM. Total dari kedua belas RT, hanya delapan toren yang bisa digunakan warga.

“Saya ambil contoh di RT12. Wilayah kita kan sangat luas, sedangkan toren dari PAM di sini cuman lima. Kalau warga yang rumahnya jauh dari toren, pastinya akan merasa capek karena harus jalan kaki membawa jeriken berat berisi air,” ucapnya sembari tertawa kecil.

Dampaknya terhadap Ibu Hamil

Selain menjadi ketua RT, Juairiah juga seorang kader posyandu. Dari pengalamannya, ia pernah menemui beberapa ibu hamil dan anak-anak yang datang ke posyandu dengan keluhan sakit perut. Tidak hanya itu, ia juga pernah menemukan warga yang mengadu kena diare.

Juairiah menawarkan tim Didaktika untuk menemui temannya yang pernah kena diare saat hamil. Ia segera masuk ke dalam rumah, mengambil ponsel, lalu menelepon temannya, Aryawati.

Sayup-sayup terdengar suara Aryawati melalui speaker ponsel. Juairiah pun mempersilakan kami untuk datang ke rumahnya. Kami langsung beranjak menuju rumah Aryawati yang ternyata hanya berjarak dua gang saja dengan diantar oleh Juairiah bersama anak bontotnya. Namun, kami harus berpisah dengan Juairiah karena ia harus datang ke pengajian di musala.

Setelah sampai di kediamannya, anak bontot Juairiah mengenalkan kami dengan Aryawati yang tengah menggendong anaknya. Malam itu di depan warung rumahnya, Aryawati menceritakan pengalamannya kena diare sebanyak tiga kali. Saat itu, ia tengah mengandung anak bontotnya, Mahdi, kurang lebih satu setengah tahun yang lalu.

Aryawati pada awalnya menduga ia diare karena makanan yang dikonsumsi tidak higienis. “Saya waktu itu beli makan di warteg karena sedang mengidam. Tiba-tiba dikemudian hari, saya terkena diare hingga tiga kali. Saat itu juga, saya jadi merasa tidak tertarik untuk makan. Alhasil berat badan turun sampai lima kilogram,” ujar Aryawati sembari mendengarkan suara mengaji Juairiah melalui speaker musala.

Saat itu, ia terpaksa harus pulang pergi ke puskesmas untuk mendapatkan obat sesuai dosis untuk ibu hamil. Namun, ia tidak begitu berani minum obat terlalu banyak. “Kalo ibu hamil kan takaran dosis obatnya harus pas, kalau kebanyakan bisa menimbulkan penyakit baru, sedangkan jika terlalu sedikit juga efeknya tidak muncul. Akhirnya, karena saya tidak ingin mengambil risiko, saya hanya minum air yang banyak saja. Beruntung dapat sembuh,” pungkasnya di akhir wawancara.

Berpindah dari kediaman Aryawati, tim Didaktika menemukan kasus lain di RT10/ RW22. Siang itu (18/8), kami diantar oleh kader posyandu Kerang Hijau, Yanti, menemui seorang ibu hamil bernama Sapna yang tengah mengobrol di teras rumah bersama ibu-ibu lainnya.

Sapna bertanya kami berasal dari mana dan mempersilakan kami duduk terlebih dahulu. Sembari menawarkan suguhan minum, ia bersyukur hingga kehamilannya saat ini memasuki usia empat bulan, dirinya tidak pernah terserang diare atau penyakit perut lainnya.

Namun, Sapna memiliki keluhan lain. Ia merasa kesulitan mengakses air bersih karena di RT10 tidak ada toren PAM. Sehari-hari, ia menggunakan air sumur yang dialirkan dari musala untuk keperluan mandi. Untuk mencuci baju, alat masak dan makan, Sapna menggunakan air yang dijual di gerobak. Sedang untuk minum, Sapna membeli air galon 15 liter.

Jika ditotal dalam sebulan, Sapna bisa habis sampai lima ratus ribu rupiah. Belum lagi jika air sumur tidak mengalir, Sapna terpaksa menggantinya dengan jasa orang dorong gerobak yang menjual air PAM. Kalau ditotal seingat Sapna ia bisa merogoh kocek satu juta rupiah per bulan. “Ya harus mengirit penggunaan air, jangan terlalu boros. Harga air mahal, kita di sini cari duitnya aja susah, bingung kalau tidak punya duit,” kata Sapna bersama ibunya sembari tertawa.

Dari Pengaduan dan Perlawanan

Di tengah obrolan kami dengan Sapna, suaminya, Buapuji pulang dari tempat kerjanya sebagai montir reparasi mobil truk panggilan. Ia langsung menyambung obrolan kami terkait air bersih.

Buapuji mengatakan solusi sementara dari pembelian air bersih yang mahal adalah dibangunnya toren. Sayangnya, hal itu tidak dapat dirasakan seluruh warga di Muara Angke seperti yang dialami warga RT10 karena PAM tidak jadi membangun toren. “Padahal teknisi PAM sering banget ke rumah untuk minta bantuan ukur lokasi, karena torennya dibangun samping rumah saya. Cuma ya kirain bakal jadi. Udah dari enam bulan yang lalu warga tidak dikasih kabar,” ketus Buapuji. Kawannya, Muhidi yang juga Ketua RT10, ditelepon Buapuji untuk menjelaskan serentet kejadian yang telah terjadi. Tak berselang lama, Muhidi datang dan langsung duduk di kursi kayu dekat Buapuji. Muhidi mengeluarkan ponsel dari tasnya. Tanpa basa-basi, ia langsung menelepon pengurus PAM yang bertanggung jawab atas pembangunan toren di RT10. “Saya menelepon orang ini dari tujuh bulan yang lalu, tidak pernah diangkat sampai sekarang,” kesal Muhidi yang berkali-kali mengetuk tanda telepon.

Sore itu, ia menguraikan sekelumit unek-unek yang sudah lama terpendam karena permasalahan air di RT-nya tak kunjung usai. Kisah Muhidi diawali dengan perjalanan sejarah masuknya air PAM di Muara Angke tahun 2022. Itupun harus diperjuangkan oleh seluruh warga RW22 dengan cara berdemo di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Februari 2022 lalu.

Gubernur saat itu, Anies Baswedan dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) menanggapi demo tersebut dengan respons positif. Pada bulan November 2022, PAM masuk dan menyediakan toren. Tetapi, tidak semua RT mendapatkan toren dari PAM. Sambil menggaruk kepala, Muhidi menjelaskan ketua RT di wilayahnya yang tidak mendapat toren PAM sudah melakukan rapat dan bertemu SDA dan

PAM. Namun, bagi Muhidi penjelasan SDA dan PAM tidak memuaskan dan solutif. Seingat Muhidi, SDA dan

PAM mengatakan jika pengadaan toren harus berhenti karena menunggu antrean agenda pemerintah terkait pembangunan lain di Muara Angke hingga 2030.

“Rencananya memang Muara Angke mau membangun pipanisasi untuk pengaliran air bersih. Cuman, masa di tahun 2030? Apakah memang tidak ada solusi lain? Warga di sini butuh airnya itu sekarang, bukan menunggu tahun 2030,” tegas Muhidi sambil menunjuk gundukan batu, cikal bakal pembangunan toren PAM yang tidak jadi. Terpaksa Bertahan dan Menunggu Jawaban

Ketua Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Minawati mengatakan warga Muara Angke hingga kini terpaksa bertahan dalam kondisi minim air bersih. Data JRMK menunjukkan wilayah lain Jakarta Utara mengalami nasib serupa. Seperti di Walang Kecamatan Koja, Gedung Pompa Kecamatan Muara Baru, Gang Marlina Kecamatan Penjaringan, dan Kembang Lestari Kecamatan Tanjung Priok.

Menurut Minawati, sebenarnya SDA dan PAM sudah punya solusi. Solusi tersebut adalah pengadaan 100 kios air bersih yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta Utara pada tahun 2022. Sayangnya, persebaran kios air bersih nyatanya tidak sebanding dengan persebaran penduduk di satu wilayah.

“Masalah air bersih di Jakarta Utara, khususnya wilayah dekat laut jadi persoalan yang tidak pernah selesai. Saya pikir, pipanisasi dari PAM merupakan solusi akhir yang harus dikerjakan,” katanya saat diwawancarai di ruangan Zoom Meeting pada (18/8).

Ketua Koperasi Blok Eceng, Muara Angke, Jakarta Utara, Muslimin menambahkan proyek pengadaan pipa harus berhenti. Pasalnya PAM Jaya mengaku masih menunggu terbitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta. Namun, Muslimin menegaskan adanya kejanggalan lantaran RDTR telah terbit lewat Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022. Muslimin menuturkan, sampai saat ini warga Muara Angke masih melakukan audiensi tiap bulan untuk membahas pengadaan air bersih. Baginya, desakan kebutuhan air bersih diiringi juga kesadaran warga menyoal penurunan permukaan tanah Muara Angke. Namun, hingga kini tidak ada jawaban dari pemerintah dan PAM Jaya untuk pengadaan akses air bersih bagi seluruh warga. “Pemerintah dan PAM Jaya hanya memberikan kami kotak keluhan, tetapi tindakannya tidak ada. Kita cuman bisa pasrah saja untuk sekarang ini, ya mau bagaimana lagi?” ujar Muslimin di ruangan Zoom Meeting yang sama.

Menjadi Lingkaran Setan Jika Tidak Diselesaikan

Dosen Ahli Gizi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta (UPNVJ), Nur Intania Sofianita menekankan pentingnya warga diberi kemudahan untuk mengakses air bersih. Ini lantaran air bersih merupakan komponen paling

mendasar manusia untuk hidup. Menurut Intania, untuk mencapai air bersih, minimal sumur air tanah punya jarak sepuluh meter dari tempat penampungan tinja warga, supaya tidak bercampur. Namun, jika tempat tidak memadai, kondisi air tanah harus rutin dicek karena ada potensi tercemar. Ia menjelaskan terdapat ciri-ciri yang dapat dijadikan indikasi kualitas air tanah yang tercemar. Seperti warnanya tidak

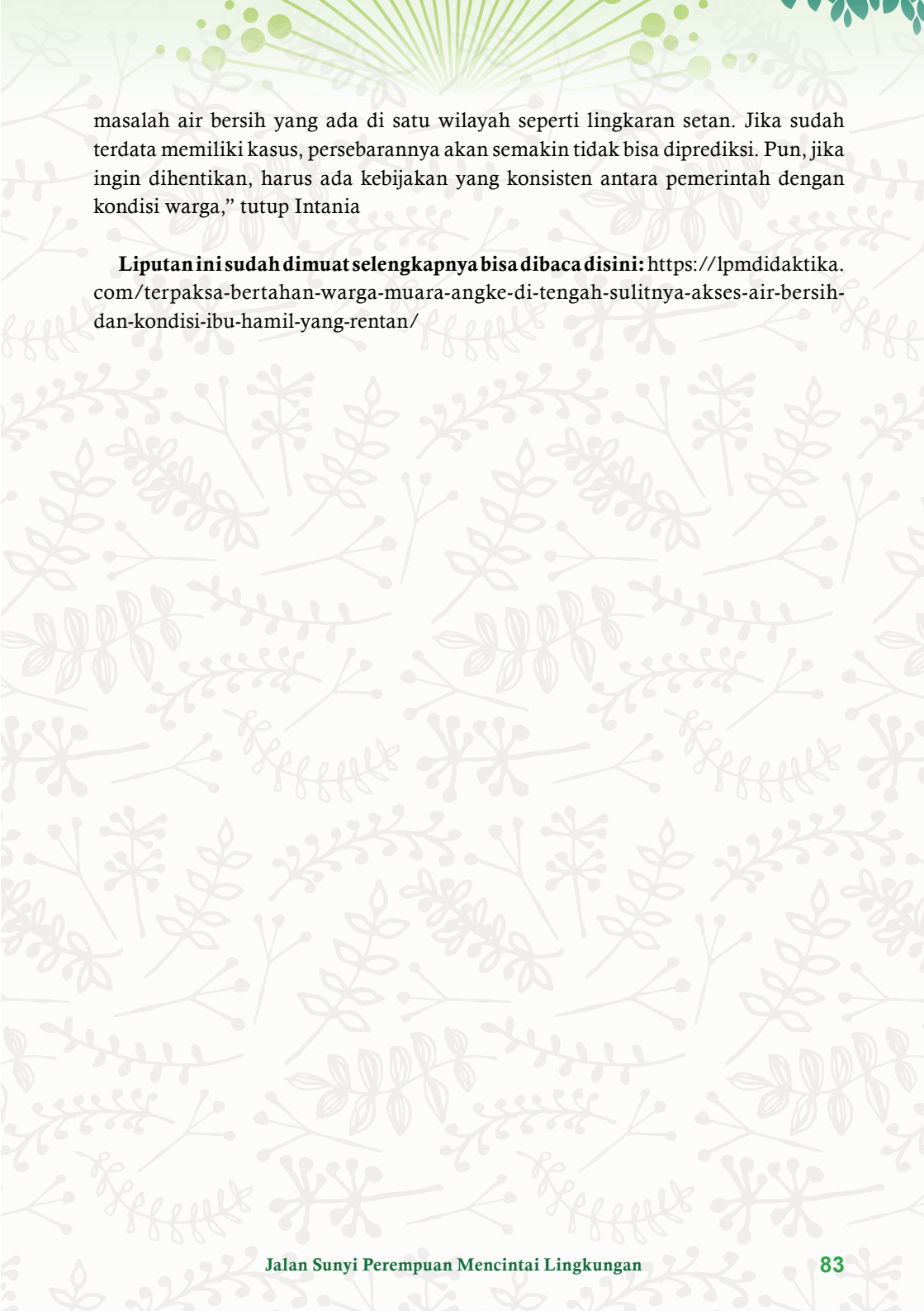


jernih, berbau, memiliki tekstur licin, dan masam. Intania menambahkan jika air tanah sudah punya ciri-ciri tersebut, harus segera dibawa ke laboratorium untuk diuji. Bisa jadi air tanah tersebut mengandung bakteri atau virus e. colli, Salmonela, Rotavirus, Hantavirus, dan lain-lainnya. “Tidak bisa langsung disimpulkan air yang memiliki ciri-ciri tercemar membawa penyakit e.colli saja. Perlu dilakukan pengujian di laboratorium. Bisa jadi, air tercemar itu memiliki kandungan bakteri atau virus yang jauh lebih berbahaya,” kata Intania saat diwawancarai di ruangnya pada (22/8).

Intania menegaskan air yang tercemar punya gejala umum dapat menimbulkan diare. Bagi ibu hamil, diare menjadi sangat berbahaya. Selain persebarannya yang tidak disadari seperti saat sedang mandi, air tercemar juga dapat menyebabkan aliran metabolisme ibu hamil tidak lancar. Pada akhirnya, ibu hamil akan mengalami dehidrasi yang mengakibatkan tubuh lemas

hingga pertumbuhan janin kurang optimal. Akibat lain adalah kematian ibu dan janin, atau anak lahir dengan penyakit. “Tubuh itu didominasi oleh cairan. Cairan itulah yang mengangkut vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lain-lainnya. Bayangkan, jika ibu hamil yang kekurangan cairan atau dehidrasi, tentunya hal itu menjadi gerbang penyakit-penyakit lain masuk,” tutur Intania

Ia juga menerangkan jika di satu wilayah warganya kesulitan mengakses air bersih, tentunya akan menimbulkan masalah yang berbuntut. Intania memberikan gambaran penjual makanan cepat saji yang memakai air tercemar. Jika air tercemar digunakan untuk keperluan mencuci tangan, membersihkan alat-alat masak dan bahan makanan, potensi penyakit yang akan tersebar makin tinggi. “Saya pikir,



masalah air bersih yang ada di satu wilayah seperti lingkaran setan. Jika sudah terdata memiliki kasus, persebarannya akan semakin tidak bisa diprediksi. Pun, jika ingin dihentikan, harus ada kebijakan yang konsisten antara pemerintah dengan kondisi warga,” tutup Intania

Liputan ini sudah dimuat selengkapnya bisa dibaca disini: <https://lpmdidaktika.com/terpaksa-bertahan-warga-muara-ange-di-tengah-sulitnya-akses-air-bersih-dan-kondisi-ibu-hamil-yang-rentan/>

IDENTITAS PENULIS

Agus Susanto

Merupakan seorang jurnalis dari Suara.com. Agus memiliki banyak pengalaman liputan terkait isu lingkungan, dimana Agus juga mendapatkan banyak tantangan ketika meliput isu tersebut. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi ketika peliputan isu lingkungan, terutama jika liputan dilaksanakan di wilayah pegunungan, Agus tetap menikmati proses peliputan-peliputan tersebut dan menganggapnya menyenangkan. Salah satu pengalamannya adalah meliput tentang isu lingkungan di area Lampung, Kabupaten Tanggamus, Agus perlu menaiki perahu untuk melintasi Sungai (waduk), jalan kaki menuruni bukit, serta naik ojek sepeda motor dengan kondisi jalan yang lumayan terjal. Beberapa pengalaman lain Agus melakukan liputan isu lingkungan adalah meliput tambang pasir dari intimidasi preman hingga aparat kepolisian.

Emi La Palau

Biasa disapa Emil adalah seorang jurnalis dari Bandungbergerak.id. Emil telah menjadi jurnalis selama 4 (empat) tahun. Emil memiliki banyak pengalaman menulis, diantaranya: *“Anak-anak Bandung di tengah Penggusurran #1: Bermain (Lagi) di atas Puing Anyer Dalam (terbit di Bandungbergerak.id)”*, *“Anak-anak Bandung di tengah Penggusurran #2: Di bawah Lindungan Masjid Al Islam Tamansari (terbit di Bandungbergerak.id)”*, *“Pergumulan Menjadi Transpria: Dituduh Mempermainkan Agama sampai Halal untuk Dibunuh (terbit di Bandungbergerak.id)”* dan *“Menengok Kasus Stunting di Permukiman Padat Bandung Setelah Pandemi Covid-19.”*

Yuli Z

Merupakan seorang kontributor Project Multatuli dan jurnalis harian Kendari Pos dengan pengalaman 4 (empat) tahun menjadi jurnalis. Beberapa tulisan Yuli antarlain *“Perdagangan Ilegal Ikan Napoleon dari Wakatobi sampai Luar Negeri (terbit di Kendari Pos)”*, *“Dua Putri Saya Dicabuli, Saya Laporkan ke Polres Baubau, Polisi Malah Tangkapi Anak Sulung Saya.”*

Maria Baru


Berasal dari suku Miyah di kabupaten Tambrau. Maria menyelesaikan pendidikan sarjana di sekolah Tinggi STBA LIA Yogyakarta 2016. Pada, tahun 2017 bergabung di LSM lokal, SKPKC-OSA di Sorong hingga 2019. Awal September 2019, di media Suarapapua.com. Akhirnya, 2020 hingga sekarang, kontributor berita di Suarapapua.com dan sedang belajar advokasi di LBH PAPUA Pos Sorong dengan fokus pada isu sosial budaya di wilayah Sorong Raya. Pernah memenangkan sayembara penulisan buku anak konteks Papua dengan judul “*Buah Matoa dari Papua*” pada tahun 2019. Suka menulis esai dan *feature* tentang kearifan lokal di Sorong Raya. Suka menghabiskan waktu untuk menulis, membaca, travelling, berkebun, makan, dan tidur.

Masya Pratiwi

Merupakan seorang mahasiswa yang tergabung dalam UKM Pers DETaK. Bergabung di pers mahasiswa membuat Masya menjadi lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dia juga menyadari bahwa banyak hal yang harus disuarakan untuk kepentingan banyak orang. Tulisan-tulisan yang Masya dan teman-temannya ternyata bisa mengubah hal-hal yang selama ini menjadi keresahan banyak orang. Dengan semua pengalaman ini, Masya tidak dapat mengungkapkan dengan baik setiap detail perjalanannya, namun keputusan mendaftar dan bergabung ke pers mahasiswa adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat.

Hilda Putri Ghaisani

Mengenyam pendidikan di salah satu Universitas di Kalimantan Barat tepatnya di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Dirinya bukanlah penikmat dunia jurnalistik, melainkan tertarik dengan dunia *broadcast*. Sejak memulai perkuliahan ia memutuskan bergabung dengan LPM Mimbar Untan, ketidaktahuan akan jurnalistik mengantarkannya ke beberapa liputan yang memberikan pelajaran disetiap langkahnya berproses. Diantaranya liputan yang paling berkesan



adalah liputan yang dimulai dengan sebuah stigma di salah satu desa di tempat tinggalnya berada. Liputan tersebut berangkat dari stigma “kampung narkoba” dan kriminalitas yang menjadikan tulisan pertamanya bergaya *feature* humanis dapat terbit tanpa terlibat masalah. Kemudian pengalaman liputan *straight news* yang turut tak terlupakan ialah kebakaran hebat yang terjadi pada gedung mangkrak persis di belakang Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, dirinya merasakan langsung betapa perihnya asap yang terhirup, melihat langsung besarnya gumpalan asap kecoklatan akibat lahan gambut yang dirasa menjadi pemicunya. Kemudian liputan yang memakan kesabaran yang melebihi batas, yaitu ketika liputan terkait produk cetak tabloid, dimana narasumber yang diharapkan sulit sekali untuk ditemui hingga menunggu lamanya sekitar 2 bulan 3 hari hingga pada akhirnya narasumber tersulit itu pun berhasil didapatkan informasinya.

Siti Umrotus Sholichah

Lahir di Semarang, 26 Mei 2001. Mulai mengenal dunia jurnalistik sejak bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa “Poros” Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tahun 2020. Sholichah pernah menjadi penanggung jawab media Instagram sekaligus designer dan ilustrator Poros tahun 2021-2022. Tahun 2022, pernah menjadi Koordinator Badan Pekerja Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) DK Yogyakarta. Saat ini menjadi Pemimpin Redaksi LPM Poros UAD.

Arnetto Bayliss Wibowo

Merupakan bagian dari Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika Universitas Negeri Jakarta (LPM Didaktika UNJ). Arnetto memiliki beragam pengalaman liputan. Ketika berdinamika di dalam pers mahasiswa, Arnetto mendapatkan pelajaran yang begitu penting. Utamanya sebagai insan pers mahasiswa Didaktika, dia mempelajari dari visi-misi organisasi, yaitu berpikir kritis dan merdeka. Dari situ, Arnetto menerjemahkannya ke dalam konsistensi bersikap dan jelas berpihak pada rakyat. Barulah dari dua hal di atas, turunannya adalah bicara soal cara bertindaknya, lewat jurnalistik. Singkatnya dia mempelajari jika pers mahasiswa merupakan bagian dari alam pergerakan yang menjadi komponen penting demokrasi, baik di dalam ataupun di luar kampus.

Buku ini dipersembahkan untuk para perempuan pejuang lingkungan yang namanya berserak dan tak tertulis

